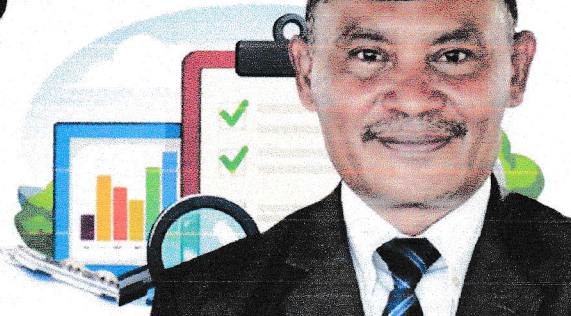
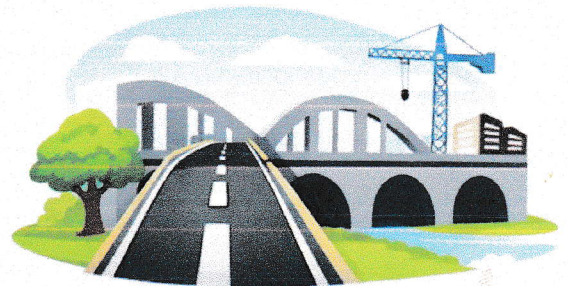
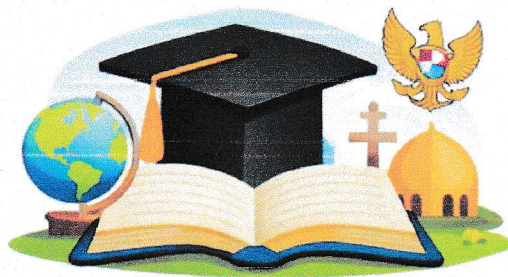




PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

LAPORAN AKUNTABILITAS INTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



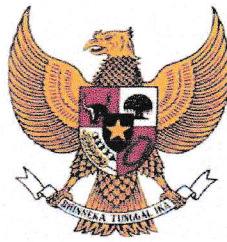
James Uang, Spd.MM
Bupati Halmahera Barat



Jufri Muhammad
Wakil Bupati Halbar



Drs. Julius Marau, M.Si
Sekda Halbar



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KATA PENGANTAR

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG, S.Pd., M.M

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Semoga laporan yang disampaikan ini dapat diterima dan dipahami serta memaknai sebagai perubahan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam memperbaiki capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tidak terlepas dari koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bersama Tim Penyusun dan pihak terkait lainnya.

Berbagai dinamika sosial, ekonomi dan regulasi nasional yang berkembang laju di pusat dan daerah semakin memberi penguatan otonomisasi dan peran pemerintah di Daerah. Hal ini menuntut kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, telah menjadi kewajiban kami untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Program dan Kegiatan dari setiap sasaran dan indikator yang diamanatkan oleh Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 6 Tahun 2021 serta ditetapkannya pada tanggal 04 November 2021 sebagai dokumen perencanaan 5 tahun dalam rangka mencapai Visi dan Misi organisasi secara terukur, melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periode sebagai amanat dari pelaksanaan terhadap implementasi Peraturan Presiden Republik

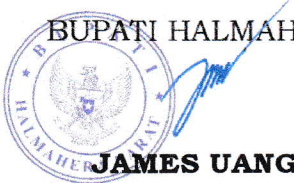
Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyajian Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan Visi, Misi, Sasaran serta Indikator Kinerja yang selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Organisasi yang ditetapkan. Untuk Menjabarkan Pelaksanaan Dokumen tersebut yang termaktub dalam Dokumen RPJMD maka ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 yang kemudian direpresentasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Halmahera Barat Tahunan sebagai target dan sasaran tercapaian tujuan dari visi dan misi Bupati Halmahera Barat di tahun 2025.

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 ini diharapkan tidak sebatas sajian data dan analisis capaian kinerjanya tapi menjadi bahan evaluasi kinerja organisasi yang sesuai dengan Visi, Misi, Sasaran, Program dan Kebijakan yang telah ditetapkan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Demikian Laporan Kinerja (LKJ) ini dibuat, untuk diketahui dan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ke depan menjadi lebih baik dalam menjalankan amanat Nawa Cita Pemerintah Republik Indonesia.

Jailolo, 27 Maret 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG, S.Pd.MM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya pemerintah yang baik merupakan prasyarat setiap Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Dalam rangka itu diperlukan media informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kebijaksanaan Pembangunan Administrasi Publik merupakan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan secara rasional harus berpedoman pada paradigma baru organisasi pembelajaran, pembangunan ekonomi, pembangunan politik, pembangunan sosial budaya, pembangunan hukum dan pemerintahan yang baik *Good Governance*.

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan capaian kinerja Dinas, Badan dan Kantor dalam satuan unit kerja Organisasi Perangkat Daerah masing-masing. Hasil pengukuran kinerja yang didasarkan indikator input (masukan), output (keluaran) dan Outcome (hasil) menunjukkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan analisis capaian kinerja dengan menggunakan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran bahwa beberapa program / kegiatan tahun 2025 menunjukkan kinerja sebagai berikut :

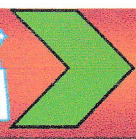
1. Secara umum Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada Tahun Anggaran 2025 baik, ini dapat terlihat dari sebagian besar sasaran yang dicapai dengan tingkat indikator capaian kinerja dapat terealisasi sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja Bupati Halmahera Barat dengan demikian dapat dikatakan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 oleh instansi di lingkup Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai rencana *strategik* dan ini diharapkan dapat lebih baik lagi ditahun-tahun mendatang.
2. Dari analisa indikator capaian kinerja dapat terealisasi bukan berarti pelaksanaan program kegiatannya tidak mengalami kendala, hambatan dan tantangan, ini terlihat sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan kadang tidak dapat berjalan, disamping itu juga masih terdapat kendala pada besaran dana/anggaran dan kondisi geografis daerah.
3. Sebagai penerapan *Good governance* dewasa ini telah diimplementasi dengan pertanggungjawaban yang akuntabel, maka diharapkan terciptanya suatu pemerintahan yang baik dalam bentuk penyampaian Laporan atas Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF LAKIP	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Halmahera Barat	2
1. Kondisi Geografis	2
2. Kondisi Pemerintahan	19
3. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)	23
Aparatur	
4. Kondisi sarana dan Prasarana	27
5. Isu Strategis Daerah	29
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 31
A. Visi Dan Misi	31
B. Tujuan, Sasaran	39
C. Perjanjian Kinerja	40
Perjanjian Kinerja	41
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 44
A. CAPAIAN KINERJA	44
1) Sasaran Ke-1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender	47
2) Sasaran Ke-2 Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	51
3) Sasaran Ke-3 Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata.	59
4) Sasaran Ke-4 :Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	76
5) Sasaran Ke-5 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan	83
6) Sasaran Ke-6 : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	90
 B. REALISASI ANGGARA	 98
BAB IV PENUTUP	105
 LAPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Reviuw Inspektorat Kab. Halmahera Barat	
3. Dokumen Pendukung	

DAFTAR TABEL

		halaman
Tabel I.1	Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	3
Tabel I.2	Luas Wilayah (Ha) Menurut Ketinggiandi Kabupaten Halmahera Barat	5
Tabel I.3	Kemiringan Lereng dan Luasnya di Kabupaten Halmahera Barat	6
Tabel I.4	Desa Pesisir dan Desa Bukan Pesisir Di Kabupaten Halmahera Barat	6
Tabel I.5	Lokasi dan Panjang Sungai di Kabupaten Halmahera Barat	10
Tabel I.6	Nama Mata Air, Lokasi dan Debitnya Di Kabupaten Halmahera Barat	11
Tabel I.7	Potensi Cekungan Air Tanah Di Kabupaten Halmahera Barat	12
Tabel I.8	Kondisi Klimatologi Kabupaten Halmahera Barat Kondisi Klimatologi Kabupaten Halmahera Barat	12
Tabel I.9	Kondisi Cuaca Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022	13
Tabel I.10	Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat	14
Tabel 1.11	Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	15
Tabel 1.12	Populasi dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat	15
Tabel 1.13	Presentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat	16
Tabel 1.14	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan, Jenis kelamin di Kabupaten Halmahera Barat	18
Tabel 1.15	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera Barat	18
Tabel 1.16	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera Barat	24
Tabel 1.17	Sarana dan Prasarana	24



BAB I

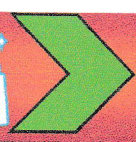
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 dinyatakan bahwa azas - azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban.

Juga sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam



perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

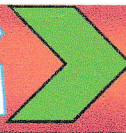
Tiga pilar *Good Governance* antara lain Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, tiga pilar ini merupakan *spirit* yang harus dimiliki dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan *stakeholders* terkait guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan dan dilaporkan terhadap keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Halmahera Barat adalah salah satu kabupaten yang secara administrasi wilayah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Utara. Pemekaran dimaksud telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Secara Astronomis Kabupaten Halmahera Barat berada pada 00 48' lintang utara sampai 10 48' lintang utara, serta 1270 16' 00" bujur timur sampai 1270 16' 01" bujur timur. Luas Kabupaten Halmahera Barat tercatat 2.239,114 km² dan jumlah pulau sebanyak 165. Luas laut 7.124,45 km² dan luas daratan 2.238,33 km² dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Loloda seluas 300,66 km², sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan ibu 109,82 km². Ibu Kota Kabupaten Halmahera Barat terletak di Jailolo.

Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Jailolo, Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan Sahu, Kecamatan Sahu Timur, Kecamatan Ibu, Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Tabaru, Kecamatan Loloda dan Kecamatan Loloda Tengah. Pada saat pemekaran, Kabupaten Halmahera Barat memiliki 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Jailolo, Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan Sahu, Kecamatan Ibu dan Kecamatan Loloda. Seiring perjalanan waktu dan pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat serta rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemekaran Kecamatan Jailolo. Tidak berselang lama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menerbitkan kembali Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan 3 (tiga) kecamatan baru, yaitu Kecamatan Sahu Timur, Kecamatan Ibu Utara



dan Kecamatan Ibu Selatan, sehingga sejak saat itu Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari 8 (delapan) kecamatan. Berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017, Kecamatan Jailolo Timur masuk wilayah Pemerintahan Halmahera Utara lalu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 Kecamatan Jailolo Timur kembali masuk ke dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat, kemudian dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 dilakukan pemekaran wilayah Kecamatan Loloda menjadi Kecamatan Loloda dan Kecamatan Loloda Tengah dengan kode wilayah 820110, yang terletak di 122 pulau tanpa penghuni dan 2 (dua) pulau berpenghuni yaitu Pulau Halmahera dan Pulau Nusa Kahatola. Kecamatan Loloda Tengah dalam hal database wilayah melalui Badan Pusat Statistik masih dilakukan pencatatan bersama dengan Kecamatan Loloda.

Luas wilayah dan jumlah desa di 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada table di bawah ini.

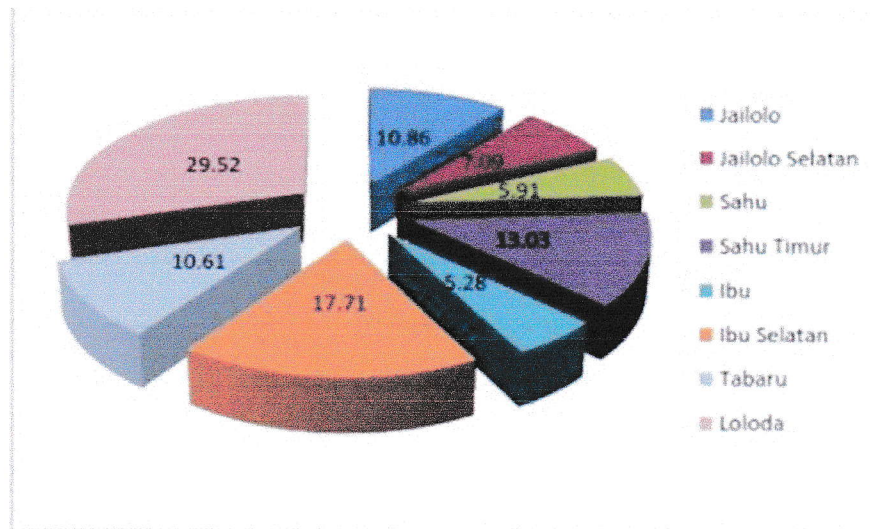
Tabel : I.1
Luas Wilayah Per Kecamatan
Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa
1	Jailolo	226,00	34
2	Jailolo Selatan	-	22
3	Sahu	122,86	19
4	Sahu Timur	271,00	18
5	Ibu	109,82	17
6	Ibu Selatan	368,33	16
7	Tabaru	220,64	16
8	Loloda	-	17
9	Loloda Tengah	-	10
	Jumlah	2.239,114	173

Sumberdata: Kab. Halbar Dalam Angka, Tahun 2025



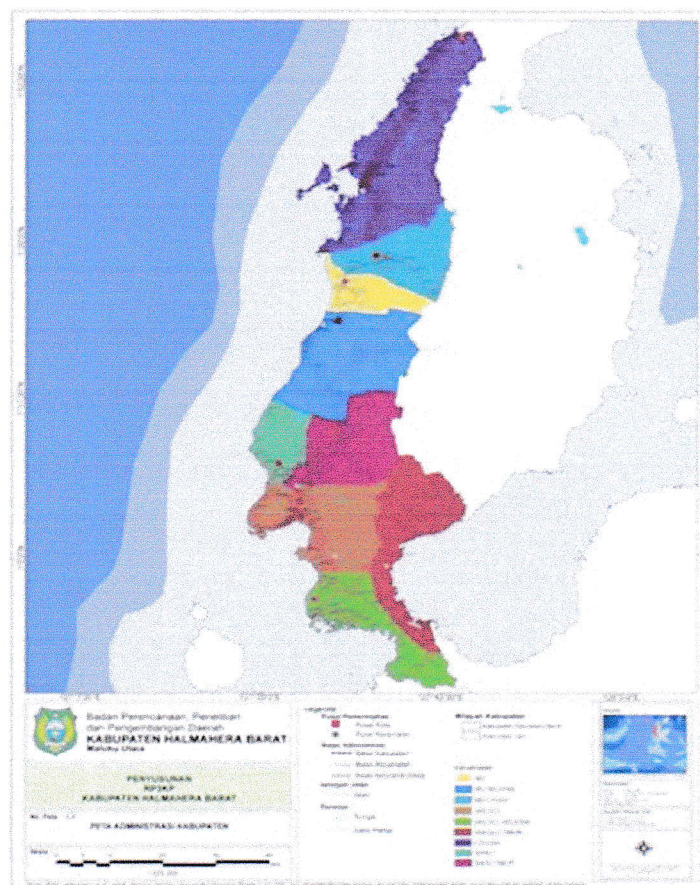
Diagram I.1. Presentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Halmahera Barat



Sumber Data: Kab. Halbar Dalam Angka, Tahun 2025

Untuk memberikan informasi mengenai letak dan posisi letak geografis Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat sebagaimana peta pada gambar di bawah ini.

Gambar : I. 1
Peta Kabupaten Halmahera Barat





Sumber Data: Bappeda Kab. Halbar, Tahun 2025

Wilayah Kabupaten Halmahera Barat terletak pada ketinggian antara 0 – 2.000-meter diatas permukaan air laut (dpl). Sebagaimana data yang tersaji dalam Tabel I.2, berdasarkan ketinggiannya, RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032 mengelompokkan wilayah Kabupaten Halmahera Barat menjadi 2 (dua), yaitu daerah dengan ketinggian di bawah 750-meter dpl dan daerah dengan ketinggian diantara 750– 2.000-meter dpl.

Tabel I.2
Luas Wilayah (Ha) Menurut Ketinggian
di Kabupaten Halmahera Barat

No	Kecamatan	Ketinggian (Meter DPL)	
		< 750	750 – 2000
1	Jailolo	25.120,6	7,00
2	Jailolo Selatan	31.332,8	2.039,5
3	Sahu	54.336,4	1.238,5
4	Sahu Timur		
5	Ibu	49.314,8	4.316,6
6	Ibu Selatan		
7	Tabaru		
8	Loloda	55.409	351,5
9	Loloda Tengah		
Halmahera Barat		215.513,6	7.953,1

Sumber: RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032

Dari tabel, dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah daratan Kabupaten Halmahera Barat berada pada ketinggian di bawah 750 mdpl yaitu seluas 215.513,6 Ha atau 96 persen dari luas wilayah daratan secara keseluruhan. Wilayah dengan ketinggian di atas 750 mdpl sebagian besar terdapat pada Kecamatan Ibu yaitu seluas 4.316,6 atau 54,3 persen dari luas wilayah dengan ketinggian 750 – 2.000 mdpl. Sementara berdasarkan hasil penelitian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Papua dan Kepulauan Maluku, diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Halmahera Barat berada pada kemiringan lereng 0-8% dan 8-16%. Gambaran selengkapnya sebagaimana tersaji pada table berikut.



Tabel I.3
Kemiringan Lereng dan Luasnya di Kabupaten Halmahera Barat

Kemiringan Lereng	0-8%	8-16%	16-24%	24-32%	31-40%	>40%	Total
Luas (Ha)	67.203,8	53.054,9	38.923,2	21.668,2	12.277,2	9.223,0	202.350,6
Persentase Luas (%)	33,21	26,22	19,24	10,71	6,07	4,56	100,00

Sumber: Buku Data dan Analisis RTRW Kab. Halbar 2012-2032

Kabupaten Halmahera Barat memiliki 173 desa, dimana 89 atau 51,44 persen diantaranya adalah Desa di wilayah pesisir. Wilayah dengan proporsi desa pesisir terbesar adalah Kecamatan Jailolo Selatan dan Ibu Selatan. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel I.4
Desa Pesisir dan Desa Bukan Pesisir
Di Kabupaten Halmahera Barat

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Desa Pesisir		Desa Bukan Pesisir	
			Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase
1	Jailolo	34	21	12,14	13	7,51
2	Jailolo Selatan	26	16	9,23	10	5,78
3	Sahu	19	10	5,78	9	5,20
4	Sahu Timur	18	-	-	18	10,40
5	Ibu	17	5	2,89	12	6,94
6	Ibu Selatan	16	14	8,09	2	1,16
7	Tabaru	16	-	-	16	9,23
8	Loloda	17	14	8,09	3	1,73
9	Loloda Tengah	10	9	5,20	1	0,58
Halmahera Barat		173	89	51,44	84	48,56

Sumber: BPS, Kabupaten Halmahera Barat Dalam Angka 2025

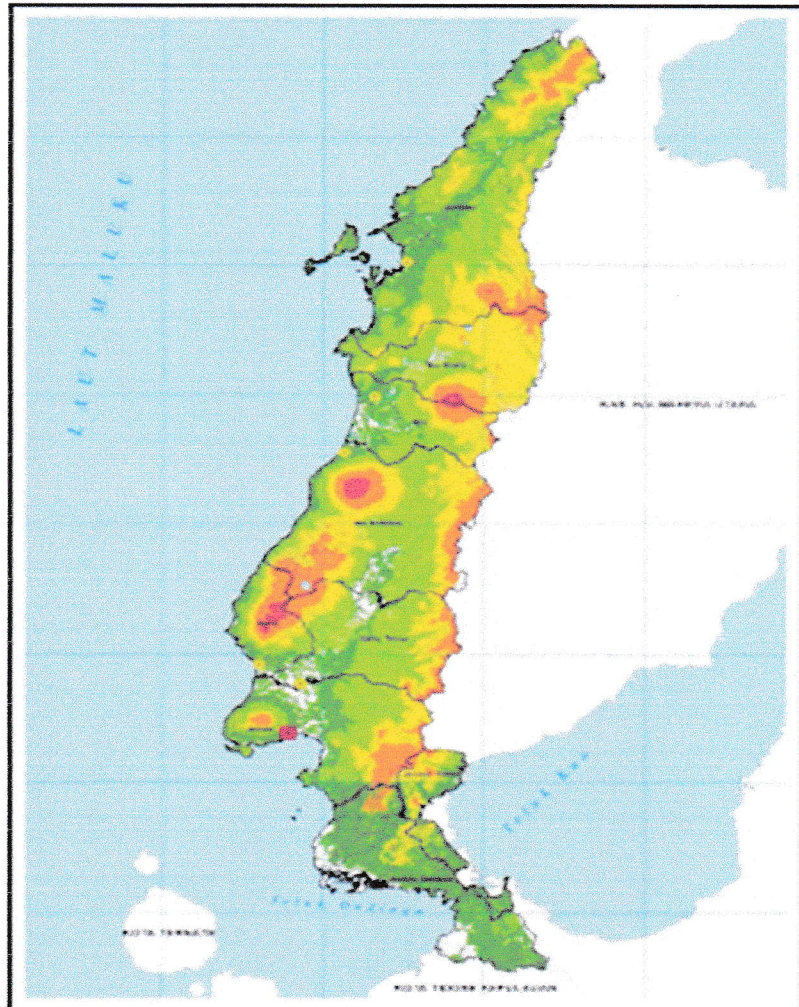
Di Kabupaten Halmahera Barat terdapat 4 (empat) gunung berapi yang hingga kini masih aktif. Gunung-gunung yang membentang sepanjang daratan Halmahera Barat ini, yaitu Gunung Jailolo di Kecamatan Jailolo (975



mdpl), Gunung Onu di Kecamatan Sahu (1.075mdpl), Gunung Gamkonora di Kecamatan Ibu Selatan (1.525 mdpl), Gunung Ibu di Kecamatan Tabaru (1.025 mdpl).

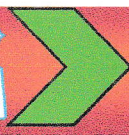
Peta topografi wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.

Gambar I.2. Peta Topografi Wilayah Kabupaten Halmahera Barat



Sumber: RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032

Formasi geologi Pulau Halmahera berdasarkan pada peta geologi lembar ternate terbagi dalam tiga mandala (bagian utama) yaitu Mandala Halmahera Timur, Halmahera barat termasuk Pulau Morotai, dan Busur Kepulauan Gunung Api Kuarter yang meliputi pulau-pulau kecil di bagian barat Pulau Halmahera. Mandala Halmahera Barat meliputi bagian Utara dan lengan Selatan Halmahera. Morfologi mandala berupa perbukitan yang tersusun atas Batuan Sedimen, pada Batu gamping berumur Neogen dan morfologi karst dan di beberapa tempat terdapat morfologi kasar yang



merupakan cerminan batuan gunung api berumur oligosen. Mandala busur kepulauan gunung api kuartar meliputi pulau-pulau kecil di sebelah barat pulau Halmahera. Deretan pulau ini membentuk suatu busur kepulauan gunung api kuartar. Sebagian pulaunya mempunyai kerucut gunung-gunung api yang masih aktif.

Kondisi fisiologi Kabupaten Halmahera Barat cukup bervariasi, yakni pada bagian timur dilalui oleh jalur Gunung Api Kuartar yang terdiri dari barisan gunung api aktif dan non aktif dengan bentuk dan struktur yang sangat khas. Luas daerah bukit/pegunungan di Halmahera Barat adalah 138.499.5 Ha atau sekitar 61,98 % dari luas wilayah. Pada bagian timur yang berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Utara hingga pesisir Pantai Jailolo dilalui Gunung Api Kuartar sehingga wilayah ini mempunyai pegunungan yang rapat dengan beberapa gunung api yang masih aktif. Di semenanjung pantai bagian barat yaitu pada Kecamatan Ibu dan Sahu merupakan daerah pegunungan dengan lereng yang curam (>40 %).

Struktur geologi wilayah Halmahera Barat merupakan bantuan jenis tertuayang berupa Batu-batuan Gunung Api Oligo Miose, Batuan Sedimen yang berumur Miosen sampai Poliosem dengan karakter Sedimen Tufaan. Struktur geologi wilayah Halmahera Barat umumnya terbentuk pada Jaman Pratersier hingga Kwartar. Formasi Geologi Jaman Pratersier terdiri dari batuan Kristal, Phylit, Batu Sabah, Serpih Liat, Batu Liat, Batu Gamping, dan Eroptip. Sedangkan formasi jaman Kwartar terdiri dari Alluvium, Pasir Lumpur, Krikil, dan Koral. Berdasarkan jenis batumannya maka struktur batuan yang ada sebagian besar tersusun atas batuan sedimen dan vulkanik dengan struktur lipatan berupa sentuhan (contact) dan patahan (fault).

Jenis batuan sedimen terdapat di Kecamatan Loloda Selatan, Ibu, Ibu Utara, Ibu Selatan, Sahu, Sahu Timur, dan Jailolo. Sedangkan jenis Batuan Vulkanik terdapat di Kecamatan Jailolo Selatan.

Adapun karakteristik tanah di Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan sifat-sifat yang berbeda mulai dari Kecamatan Jailolo Selatan di bagian selatan hingga Kecamatan Loloda Selatan di bagian utara Halmahera Barat yang dipengaruhi oleh proses-proses geologi dan iklim. Menurut jenis medianya dan proses geologi yang mempengaruhinya, jenis tanah pada



Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari Jenis Tanah Alluvial, Latosol, Regosol, dan Podsolik Merah Kuning. Sebaran dari masing-masing jenis tanah di daerah Kabupaten Halmahera Barat antara lain:

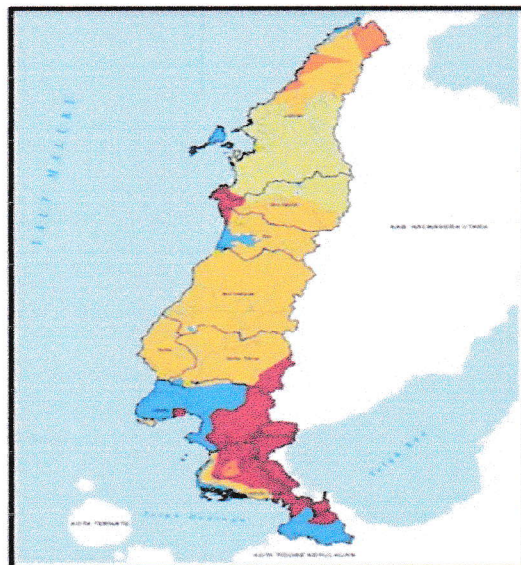
- 1) Jenis Tanah Alluvial terdapat pada Kecamatan Jailolo Selatan dan Jailolo Timur;
- 2) Jenis Tanah Latosol terdapat pada Kecamatan Jailolo Selatan, Jailolo Timur, Jailolo dan Loloda Selatan;
- 3) Jenis Tanah Regosol terdapat pada kecamatan Jailolo, Sahu, Sahu Timur, Ibu, Ibu Utara, Ibu Selatan, dan Loloda Selatan; dan
- 4) Jenis Tanah Podsolik Merah Kuning terdapat pada Kecamatan Loloda Selatan.

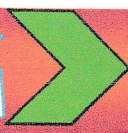
Sedangkan Menurut Taxonomy USDA tahun 1998, tanah di wilayah Kabupaten Halmahera Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kelompok A: Dystrudepts, Eutrudepts, Hapludalfs, Hapludoxs, Eutrudoxs.
- b. Kelompok B: Dystrudepts, Eutrudepts, Hapludalfs, Hapludoxs, Eutrudoxs, Udipsaments.
- c. Kelompok C: Hapludalfs, Hapludults, Dystrudepts, Eutrudepts, Hapludolls.
- d. Kelompok D: Hapludults, Hapludalfs, Dystrudepts, Eutrudepts, Hapludands, Udorthents.
- e. Kelompok E: Hapludalfs, Hapludults, Dystrudepts, Eutrudepts, Hapludolls.
- f. Kelompok F: Sulfaquents, Sulfihemists, Sulfaquents.

Adapun Peta geologi wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.3. Peta Geologi Wilayah Kabupaten Halmahera Barat





Sumber: RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032

Kondisi hidrologi Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari sungai, danau dan air permukaan tanah. Sumber air selain berasal dari dasar tanah dan permukaan tanah juga berasal dari danau, sungai dan kali, seperti Sungai Ake Diri, Ake Lamo, Ake Todowongi, Ake Sidangoli, Ake Nyinyiwit, Ake Sasur, Ake Tacici, Ake Ngibut, Ake Tahafo, Ake Duono dan Ake Tafangu. Nama-nama sungai-sungai yang besar yang melalui beberapa kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

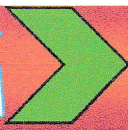
Tabel I.5
Lokasi dan Panjang Sungai di Kabupaten Halmahera Barat

No	Nama Sungai	Lokasi (Kecamatan)	Panjang (m)
1	Ake Diri	Jailolo	8.120
2	Ake Lamo	Jailolo	6.597
3	Ake Todowongi	Jailolo	9.765
4	Ake Sidangoli	Jailolo Selatan	3.806
5	Ake Nyinyiwit	Jailolo Timur	9.547
6	Ake Sasur	Sahu	3.445
7	Ake Tacici	Sahu	2.116
8	Ake Ngibut	Sahu Timur	3.460
9	Ake Tahafo	Ibu	5.691
10	Ake Duono	Tabaru	5.019
11	Ake Tafangu	Ibu Selatan	7.791

Sumber: Kabupaten Halmahera Barat Dalam Angka 2024

Di Kabupaten Halmahera Barat terdapat 4 (empat) danau, yaitu Danau Rano yang terletak di Kecamatan Sahu, Danau Gamkonora di Kecamatan Ibu, serta Danau Duono dan Danau Todoke di Kecamatan Tabaru.

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air tersebut bergerak di dalam ruang antar butir-butir tanah dan meresap ke dalam tanah lalu bergabung membentuk lapisan di dalam tanah yang disebut akuifer. Berdasarkan data Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku Utara dalam Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Halmahera Utara (termasuk Halmahera Barat), Daerah sekitar Jailolo, Susupu, Ibu dan Goin di Pulau Halmahera merupakan daerah paling prospektif kandungan air tanahnya, mengingat daerah tersebut merupakan bagian kaki gunung Strato, dimana aliran air



tanah yang berasal dari puncak dan tubuh gunung api tertahan oleh batuan padu yang berumur lebih tua.

Akuiferter penting di daerah gunung Strato adalah lava basal berstruktur versikuler dan tufa, tercatat munculnya beberapa mata air dari akuifer tersebut dengan debit dapat mencapai lebih dari 100 l/dt. Akuifer di daerah perbukitan bergelombang umumnya mempunyai produktivitas rendah dan setempat berarti, airtanah dengan jumlah terbatas masih dapat diperoleh di lembah-lembah. Kelompok batuan vulkanik tak teruraikan dapat diharapkan bertindak sebagai sebagai akuifer produktif dengan kelulusan sedang. Potensi debit mata air yang terdapat di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel I.6
Nama Mata Air, Lokasi dan Debitnya
Di Kabupaten Halmahera Barat

No	Nama Mata Air	Lokasi (Kecamatan)	Debit (lt/dt)
1	Sosa iku 1	Ibu	100,0
2	Sosa iku 2	Ibu	500,0
3	Pancuran	Ibu	10,0
4	Akeboso	Ibu	300,0
5	Goiu	Ibu	0,5
6	Tuladi	Ibu	0,2
7	Kawao	Sahu	0,5
8	Gamkonora	Sahu	500,0
9	Duter	Jailolo	200,0
10	Gurutu	Jailolo	100,0
11	Golo	Jailolo	30,0
12	Aketola	Jailolo	500,0
13	Rugasi	Jailolo	1,0
14	Jailolo	Jailolo	300,0
15	Gurango	Jailolo	400,0

Sumber: Buku Data dan Analisis RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2023



Tabel I.7
Potensi Cekungan Air Tanah Di Kabupaten Halmahera Barat

No. CAT	Cekungan Air Tanah (CAT)		Jumlah Air Tanah [jutam3/tahun]		Kategori CAT	
	Nama	Luas [Km ²]	Bebas (Q1)	Tertekan (Q2)	Prov	Kab/Ko ta
320	Ibu	756	454	249	x	
322	Jailolo-Sidangoli	1576	531	177	x	
	Total	2.332	985	426	2	

Sumber Data: RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024

Dari tabel, di wilayah Kabupaten Halmahera Barat juga terdapat Cekungan Air Tanah (CAT) yang merupakan CAT kategori provinsi.

Kondisi klimatologi Kabupaten Halmahera Barat secara umum adalah iklim laut tropis dan iklim musim dengan curah hujan 1500-3500 mm/tahun. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten Halmahera Barat merupakan perairan laut yang luas, sehingga iklim yang terjadi sangat dipengaruhi perkembangan cuaca laut yang berlangsung seiring dengan musim yang ada. Data perkembangan cuaca tahun 2022 di Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel I.8
Kondisi Klimatologi Kabupaten Halmahera Barat

	Uraian	Persentase
1	Suhu (0C) :	
	a. Maksimum.	33,80
	b. Minimum.	23,00
	c. Rata-rata.	26,90
2	Kelembaban Udara :	
	a. Maksimum	98,00
	b. Minimum	52,00
	c. Rata-rata	81,90
3	Tekanan Udara (mb)	1.0007,50

Sumber data : Kabupaten Halbar Dalam Angka, Tahun 2022

Iklim Kabupaten Halmahera Barat secara umum adalah iklim laut tropis dan iklim musim, disebabkan sebagian besar wilayah Halmahera Barat merupakan perairan laut yang luas, sehingga iklim yang terjadi sangat



dipengaruhi perkembangan cuaca laut yang berlangsung seiring dengan musim yang ada. Tabel I.8 menyajikan kondisi cuaca Kabupaten Halmahera Barat yang meliputi suhu udara, kelembaban udara, dan tekanan udara sepanjang tahun 2022.

Tabel I.9
Kondisi Cuaca Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022

Bulan	Suhu Udara(°C)			Kelembaban Udara (persen)			Tekanan Udara (mb)		
	Min	Rerata	Max	Min	Rerata	Max	Min	Rerata	Max
Januari	23,8	27,4	33,2	67,0	83,6	97,0	1.001,8	1.006,8	1.011,8
Februari	23,8	28,0	33,2	64,0	83,9	98,0	1003,6	1.007,7	1.011,6
Maret	24,0	28,0	33,6	67,0	86,5	98,0	1003,5	1.007,3	1.011,1
April	24,2	28,1	33,5	68,0	86,9	98,0	1003,7	1.007,3	1.010,6
Mei	24,6	28,4	33,6	60,0	85,7	98,0	1001,7	1.006,7	1.011,7
Juni	23,6	27,4	33,4	70,0	87,6	99,0	1003,2	1.006,7	1.010,4
Juli	23,6	26,9	32,4	69,0	87,8	100,0	1.003,0	1.006,1	1.009,7
Agustus	23,6	27,3	33,0	60,0	84,9	98,0	1003,1	1.006,8	1.010,6
September	23,0	27,0	33,0	60,0	87,3	97,0	1.002,1	1.006,6	1.010,5
Oktober	23,4	27,3	33,4	60,0	87,0	97,0	1.002,2	1.005,8	1.010,4
November	24,0	27,6	33,2	63,0	87,4	98,0	1.002,2	1.006,0	1.010,0
Desember	23,8	27,7	32,6	44,0	85,4	98,0	1.001,0	1.005,2	1.009,0

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2022

Sebagaimana tersaji, rata-rata suhu udara sepanjang tahun 2022 berada padakisaran 26,9 derajat celcius hingga 28,4 derajat celcius. Suhu terendah tercatat pada bulan September, yaitu 23 derajat dan suhu tertinggi pada bulan Maret dan Mei, yaitu 33,6 derajat. Rata-rata kelembaban udara sepanjang tahun 2020 berada padarentang 83,8 persen hingga 87,8 persen. Rata-rata tekanan udara sepanjang tahun 2022 berada pada kisaran 1005,2 mb hingga 1007,7 mb.

Adapun curah hujan di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2022 sebesar 672 mm atau lebih rendah dibandingkan kondisi di tahun 2021 dan 2022. Jumlah hari hujan dalam setahun pada tahun 2022 lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2022 namun lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Selengkapny dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



2. Kondisi Demografi

Sampai dengan tahun 2025 penduduk Kabupaten Halmahera Barat berjumlah 139.764 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 71.695 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 68.069 jiwa. Data dan informasi tentang pertumbuhan penduduk per kecamatan dan tingkat kepadatan penduduk, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada table di bawah ini.

Tabel I.10
Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan
Kabupaten Halmahera Barat

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah penduduk		Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)
		Km2	%	Jiwa	%	
1	Jailolo	226,00	10,30	38.141	27,04	168,77
2	Jailolo Selatan	-	-	25.265	17,91	-
3	Sahu	122,86	5,60	12.706	9,01	103,42
4	Sahu Timur	271,00	12,35	11.696	8,29	43,16
5	Ibu	109,82	5,00	13.158	9,33	119,81
6	Ibu Selatan	368,33	16,79	15.849	11,24	43,03
7	Tabaru	220,64	10,05	10.249	7,26	46,45
8	Loloda	-	-	9.262	6,57	-
9	Loloda Tengah	-	-	4.730	3,35	-
	Jumlah	2.239,114	100	141.056	100	87,44

Sumberdata: Dinas Dukcapil Kab. Halmahera Barat 2025

Kepadatan penduduk yang relatif tinggi ini, kiranya dapat dijadikan masukan dalam merumuskan berbagai strategi, kebijakan dan program/kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Optimalisasi pemanfaatan program/kegiatan oleh seluruh Masyarakat dapat terjadi jika dokumen perencanaan pembangunan daerah berkualitas.

Sebaran penduduk di 9 (sembilan) kecamatan dalam periode tahun 2025 dan pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat sebagaimana data dan informasi yang terdapat pada table di bawah ini.



Tabel I.11
Data Penduduk Berdasarkan Jenis
Kelamin Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2025

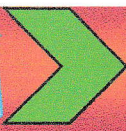
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah	Rasio Jenis kelamin
		Laki-laki	Perempuan		
1	Jailolo	19.516	18.625	38.141	104.78
2	Jailolo Selatan	12.843	12.422	25.265	103.38
3	Sahu	6.466	6.240	12.706	103.62
4	Sahu Timur	6.044	5.652	11.696	106.94
5	Ibu selatan	8.166	7.683	15.849	106.29
6	Ibu	6.757	6.401	13.158	105.56
7	Tabaru	5.288	4.961	10.249	106.59
8	Loloda	4.768	4.494	9.262	106.09
9	Loloda Tengah	2.461	2.269	4.730	108.46
Jumlah		72.309	68.747	141.056	105.18

Sumberdata: Dinas Dukcapil Kab. Halbar Tahun 2025

Selain data sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk melengkapi informasi tentang potensi bonus geografi yang akan dikelola sebagai salah satu kekuatan yang akan mendorong untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat sepanjang tahun 2025 meliputi gambaran tentang pertumbuhan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan status pekerjaan dan pertumbuhan penduduk berdasarkan kelompok usia.

Kedua data dan informasi tersebut, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada grafik di bawah ini.

Tabel I.12
Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Pendidikan dan Status Pekerjaan
Kabupaten Halmahera Barat



Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ <i>Educational Attainment ¹</i>	Angkatan Kerja/Labour Force			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja <i>Percentage of Working to Labour Force</i>
	Bekerja <i>Working</i>	Pengangguran ² <i>Unemployment ²</i>	Jumlah Angkatan Kerja <i>Total of Labour Force</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	25.555	540	26.095	97,93
1	9.876	328	10.204	96,79
2	27.179	1.766	28.945	93,90
3	8.850	392	9.242	95,76
Jumlah/Total	71.460	3.026	74.486	95,94

Catatan/Note: ¹ 0. ≤ Sekolah Dasar (SD)/≤ Primary School

1. Sekolah Menengah Pertama/Junior High School

2. Sekolah Menengah Atas/Senior High School

3. Perguruan Tinggi/Collage

² 1. Mencari pekerjaan/Looking for work

2. Mempersiapkan usaha/Establishing a new business/firm

3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/Feeling hopeless in looking for work (discouraged job seekers)

4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja/Having job already but not starting to work yet

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Sumberdata: Bps; Halbar Dalam Angka Tahun 2024

Sedangkan data dan informasi penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2025, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada gambar di bawah ini.

Tabel I.13
Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025



Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	3.732	3.518	7.250
5-9	5.891	5.311	11.202
10-14	6.256	5.779	12.035
15-19	6.761	6.060	12.821
20-24	7.331	6.813	14.144
25-29	6.675	6.239	12.914
30-34	5.575	5.380	10.955
35-39	5.461	5.338	10.799
40-44	5.329	5.343	10.672
45-49	5.070	5.022	10.092
50-54	4.301	4.115	8.416
55-59	3.301	3.107	6.408
60-64	2.370	2.295	4.665
65-69	1.972	2.004	3.976
70-74	1.140	1.093	2.233
75+	1.144	1.330	2.474
Halmahera Barat	72.309	68.747	141.056

Sumber data: BPS, Halbar Dalam Angka, Tahun 2025

Berdasarkan Data kelompok usia ini, memberi gambaran bahwa kelompok usia Halmahera Barat, masuk dalam kategori kelompok usia muda, dimana populasi penduduk usia anatar 10 sd 20 tahun yang cukup menebal, dalam 5 tahun kedepan akan bergeser sebagai kelompok usia produktif, yang dikenal dengan Bonus Demografi, karena kelompok usia produktif makin banyak akan menggerakkan perekonomian daerah.

Dari data di atas dapat diketahui, bahwa penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dari pada pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD), lebih sedikit. Artinya rata-rata lama mengikuti pendidikan pada masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat, relatif pendek.



Sementara itu, dari sisi pertumbuhan penduduk berdasarkan kelompok usia terlihat, bahwa 5 (lima) besar pertumbuhan penduduk sepanjang tahun 2025 di Kabupaten Halmahera Barat adalah pada penduduk dengan usia 5-9 tahun, kemudian penduduk pada usia 10-14 tahun, berikutnya penduduk usia 15-19 tahun, lalu penduduk usia 20-24 tahun dan penduduk dengan usia 25-29 tahun.

Tabel I.14
Populasi dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat

Kecamatan <i>District</i>	Jumlah Penduduk (jiwa) <i>Population (people)</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2024 (%) <i>Annual Population Growth Rate 2020–2024 (%)</i>
(1)	(2)	(3)
Jailolo	38.145	0,64
Jailolo Selatan	25.265	0,34
Sahu	12.706	0,58
Sahu Timur	11.696	0,70
Ibu	13.158	0,29
Ibu Selatan	15.849	0,08
Tabaru	10.249	0,70
Loloda	9.262	0,23
Loloda Tengah	4.730	0,48
Halmahera Barat	141.056	0,46

Sumber data: BPS, Halbar Dalam Angka, Tahun 2025

Tabel I.15
Presentase dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat

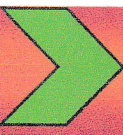


Kecamatan <i>District</i>	Persentase Penduduk <i>Percentage of Total Population</i>	Kepadatan Penduduk per km ² <i>Population Density per sq.km</i>
(1)	(4)	(5)
Jailolo	27,04	-
Jailolo Selatan	17,91	-
Sahu	9,01	-
Sahu Timur	8,29	-
Ibu	9,33	-
Ibu Selatan	11,24	-
Tabaru	7,27	-
Loloda	6,57	-
Loloda Tengah	3,35	-
Halmahera Barat	100,00	63,04

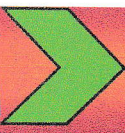
Sumber data: BPS, Halbar Dalam Angka, Tahun 2025

3. Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2021 dan Perda Nomor 2 Tahun 2023 susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:



- Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah melaksanakan unsur penunjang sekretariat daerah. Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan dan SDA
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja
 - b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - 1. Bagian Unit Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2. Bagian Hukum dan Organisasi
 - c. Asisten Administrasi Umum
 - 1. Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan
- Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD melaksanakan unsur penunjang sekretariat DPRD;
- Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat melaksanakan unsur penunjang pengawasan.
- Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat, terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan

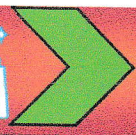


Lingkungan Hidup;

- 5) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
- 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 8) Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- 9) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Halmahera Barat Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM;
- 10) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 12) Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga;
- 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 14) Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kominfo, Statistik dan Persandian;
- 15) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;



- 16) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Badan Daerah terdiri dari:
 - 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah;
 - 3) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah;
 - 4) Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan diklat;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang penanggulangan bencana di daerah;
 - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - Kecamatan, yang terdiri dari 9 kecamatan dan melaksanakan unsur penunjang kewilayahan, antara lain:
 - 1) Kecamatan Jailolo dengan Tipe A;
 - 2) Kecamatan Jailolo Selatan dengan Tipe A;
 - 3) Kecamatan Sahu dengan Tipe A;
 - 4) Kecamatan Sahu Timur dengan Tipe A;
 - 5) Kecamatan Ibu dengan Tipe A;
 - 6) Kecamatan Ibu Selatan dengan Tipe A;
 - 7) Kecamatan Tabaru dengan Tipe A;
 - 8) Kecamatan Loloda dengan Tipe A;
 - 9) Kecamatan Loloda Tengah dengan Tipe A;



Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Staf Ahli. Staf Ahli tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Staf ahli dimaksud antara lain:

- 1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan
- 2) Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
- 3) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten dibidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah kabupaten. Satuan Pendidikan Daerah kabupaten dimaksud berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah Sakit Daerah Kabupaten bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

4. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan data SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) Tahun 2025 sebanyak 3.096 orang, sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak berjumlah 1.266 orang. Berikut Tabel Jumlah ASN berdasarkan golongan dan jenis kelamin sebagai berikut:



TABEL I.16
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan, Jenis kelamin
di Kabupaten Halmahera Barat

Jabatan	2025		
	laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Fungsional Tertentu	631	1326	1957
Fungsional Umum/Staf	444	310	754
Fungsional Penyetaraan	64	53	117
Struktural			
Eselon V	0	0	0
Eselon IV	68	52	120
Eselon III	95	30	125
Eselon II	16	7	23
Eselon I	0	0	0
Jumlah	1318	1818	3096

TABEL I.17
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan
Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera Barat

Tingkat Pendidikan	2025		
	laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Sampai dengan SD	1	0	1
SMP/Sederajat	6	1	7
SMA/ Sederajat	347	207	554
Diploma I,II/akta,I,II	55	90	145
Diploma III/Akta III/Sarjan Muda	62	265	327



Tingkat Sarjana/Doktor/PhD	845	1217	2062
Jumlah	1316	1780	3096

TABEL I.18

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera Barat

Pangkat/Golongan/Ruang (1)	2025		
	laki-laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)
Golongan I			
1. I A (Juru Muda)	0	0	0
2. I/B (Juru Muda Tk. I)	0	0	0
3. I/C (Juru)	1	1	2
4. I/D (Juru Tingkat)	1	0	1
Golongan II			
5. II/A (Pengatur Muda)	13	6	19
6. II/B (Pengatur Muda Tk.I)	47	34	81
7. II/C (Pengatur)	85	87	172
7. II/D (Pengatur Tk.I)	103	88	191
Golongan III			
8. III/A (Penata Muda)	188	231	419
9. III/B (Penata Muda Tk.I)	210	351	561
10. III/C (Penata)	146	250	396
11. III/D (Penata Tk. I)	276	491	667
Golongan IV			
12. IV/A (Pembina)	135	132	267
13. IV/B (Pembina TK I)	99	97	196



14. IV/C (Pembina Muda)	12	11	23
15. IV/D (Pembina Madya)	1	0	1
16. IV/E (Pembina Utama)	0	0	0
Jumlah	1317	1779	3096

Sumber Data : BKD Kab. Halbar Tahun 2025

TABEL I.19

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak
Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera Barat

Tingkat Pendidikan <i>Educational Level</i>	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja <i>State Employees with Employment Agreements</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(5)	(6)	(7)
Sekolah Dasar (SD) <i>Primary School</i>	---	---	---
Sekolah Menengah Pertama (SMP) <i>Junior High School</i>	---	---	---
Sekolah Menengah Atas (SMA) <i>Senior High School</i>	153	66	219
Diploma I/Akta I <i>Diploma I/Akta I</i>	---	---	---
Diploma II/Akta II <i>Diploma II/Akta II</i>	---	---	---
Diploma III/Akta III <i>Diploma III/Akta III</i>	24	270	294
Diploma IV/Akta IV <i>Diploma IV/Akta IV</i>	1	18	19
S1/Sarjana <i>Under Graduate/Bachelor</i>	155	579	734
S2/Pasca Sarjana <i>Graduate</i>	---	---	---
S3/Doktor/Ph.D <i>Post Graduate</i>	---	---	---
Jumlah/Total	333	933	1.266

Sumber data: BPS, Halbar Dalam Angka, Tahun 2025

TABEL I.20

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak
Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin



di Kabupaten Halmahera Barat

Pangkat/Golongan/Ruang <i>Hierarchy</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I	...	...	...
II	...	...	...
III	...	...	...
IV	...	...	...
V	153	66	219
VI	...	...	...
VII	24	270	294
VIII	...	...	...
IX	142	547	689
X	14	50	64
XI	...	...	...
XII	...	...	...
XIII	...	...	...
XIV	...	...	...
XV	...	...	...
XVI	...	...	...
XVII	...	...	...
Jumlah/Total	333	933	1.266

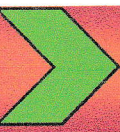
Sumber data: BPS, Halbar Dalam Angka, Tahun 2025

5 Kondisi Sarana dan Prasarana

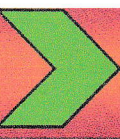
Selain itu instrument penunjang lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk setiap perangkat daerah sebagaimana dalam table di bawah ini:

Tabel I.21
Sarana dan Prasarana

NO	NAMA OPD	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI	KET
1	SEKRETARIAT DAERAH	3.442	47.737.072.479,00	
2	SEKRETARIAT DPRD	1.425	13.222.391.575,00	
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	16.327	56.824.502.195,79	
4	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	6.951	145.549.095.067,00	



5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	251	6.774.529.628,00	
6	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	537	12.688.213.838,35	
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL	91	1.406.984.806,00	
8	DINAS PERHUBUNGAN	907	9.715.750.337,00	
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	352	8.065.393.491,00	
10	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA	367	3.113.473.121,00	
11	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	444	8.921.136.834,00	
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	67	332.385.180,00	
13	DPMPD	148	734.775.000,00	
14	DPMPTSP	161	965.891.744,00	
15	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	989	7.730.016.326,00	
16	DINAS SOSIAL DAN P3A	228	1.428.067.025,00	
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	232	4.276.748.998,00	
18	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	97	1.054.247.070,00	
19	INSPEKTORAT DAERAH	243	2.237.272.841,00	
20	SATPOL PP DAN DAMKAR	336	3.951.479.617,00	
21	RSUD JAILOLO	2.763	124.257.415.155,75	
22	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	141	870.849.721,75	
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	198	3.294.659.125,00	
24	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	360	2.487.891.981,00	
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	232	1.476.229.064,00	
26	BADAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH	987	12.708.775.510,20	
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	62	999.475.064,74	
28	KECAMATAN JAILOLO	44	369.891.000,00	
29	KECAMATAN JAILOLO SELATAN	64	452.630.250,00	
30	KECAMATAN SAHU TIMUR	46	348.068.300,00	
31	KECAMATAN SAHU	30	351.892.000,00	



32	KECAMATAN IBU SELATAN	30	402.280.000,00	
33	KECAMATAN IBU	48	456.030.225,00	
34	KECAMATAN TABARU	28	320.325.000,00	
35	KECAMATAN LOLODA	37	355.450.000,00	
36	KECAMATAN LOLODA TENGAH	17	67.350.000,00	

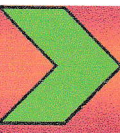
Sumber Data : BKAD Kab. Halbar Tahun 2025

Dari data sarana dan prasarana yang ada pada Kabupaten Halmahera Barat di atas dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja sudah cukup memadai untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.

6. Isu Strategis Daerah

Dengan memperhatikan kelima kondisi Kabupaten Halmahera Barat tersebut maka sudah terakomodir kedalam RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 –2026 yang merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Berpijak pada permasalahan pembangunan, serta berbagai dinamika yang terjadi baik ditingkat internal maupun eksternal, maka RPJMD Kabupaten Halmahera Barat berawal dari isu strategis sebagai berikut :

1. Belum efektifnya pencegahan dan penanggulangan kemiskinan.
2. Belum optimalnya penguatan ketahanan pangan daerah.
3. Belum optimalnya penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah.
4. Belum optimalnya penguatan akses dan mutu pelayanan pendidikan di seluruh wilayah.
5. Belum optimalnya penguatan pencegahan dan perlindungan perempuan dan khusus anak.



6. Belum optimalnya penguatan akses dan mutu pelayanan air minum dan sanitasi seluruh wilayah.
7. Belum optimalnya kualitas jangkauan pelayanan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi baru terbarukan.
8. Masih lambatnya transformasi structural melalui modernisasi pertanian, industrialisasi, dan pemanfaatan sumber pertumbuhan baru.
9. Masih lemahnya daya saing koperasi, UMKM dan kewirausahaan.
10. Masih lemahnya daya saing pariwisata dan pengelolaan keragaman wisata.
11. Masih kurangnya pengembangan keahlian tenaga kerja kearah industri dengan kompleksitas dan nilai tambah tinggi.
12. Belum meratanya jangkauan *mobile broad band* di seluruh wilayah.
13. Belum optimalnya pengurangan kesenjangan pembangun antar wilayah.
14. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau, serta perwujudan kota tanpa kumuh.
15. Belum optimalnya upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi alternatif.
16. Masih belum optimalnya pembangunan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim.
17. Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah.
18. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar daerah (khususnya daerah tetangga) untuk mengakselerasi pembangunan daerah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Halmahera Barat, yang ingin dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Halmahera Barat yang Aman, Adil dan Sejahtera”

Makna kata Aman, Adil dan Sejahtera yang terkandung dalam Visi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut.

Aman: suatu kondisi terciptanya ketenangan, kenyamanan, kedamaian, serta kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Halmahera Barat dengan berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal. Halmahera Barat yang aman menggambarkan perwujudan kepemilikan perasaan aman dan kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah daerah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih bermartabat dalam seluruh aspek kehidupannya.

Adil: suatu kondisi terciptanya keseimbangan dan kesetaraan dalam seluruh aspek pembangunan di wilayah kabupaten Halmahera Barat. Keadilan dalam pembangunan Kabupaten Halmahera Barat senantiasa didasarkan pada keadilan komutatif yang berorientasi pada pemerataan, dengan tetap memperhatikan keadilan distributif yang menjamin keadilan diberikan berdasarkan kebutuhan bagi setiap individu dan kelompok masyarakat, serta satuan wilayah maupun kawasan-kawasan wilayah pengembangan.

Sejahtera: Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Halmahera Barat yang memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin, di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani, rohani serta interaksi sosialnya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Halmahera Barat



2. MISI

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kalimat misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan dalam rangka pencapaian visi. Pernyataan misi disusun agar tidak terjadi multitafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju. Berdasarkan perspektif tersebut, maka dalam rangka mewujudkan **“Halmahera Barat yang Aman, Adil dan Sejahtera”** sebagai visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Halmahera Barat 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah, yaitu:

1. Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan kesetaraan serta nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal;
2. Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah;
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya;
4. Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat.

Penjabaran makna dari Misi pembangunan jangka menengah tersebut diuraikan sebagai berikut:

Misi-1: Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Halmahera Barat adalah bagian dari proses dan tujuan serta merupakan satu kesatuan



dalam pembangunan nasional Indonesia. Kabupaten Halmahera Barat menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang telah lebih dahulu maju. Oleh karena itu, pembangunan daerah yang maju dan mandiri, untuk mewujudkan kesejahteraan, mengharuskan dikembangkan konsep pembangunan yang bertumpu pada manusia dan masyarakatnya. Atas dasar itu, untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah yang telah dirumuskan, salah satu titik berat pembangunan diletakkan pada kualitas sumber daya manusia.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan masyarakat Halmahera Barat yang unggul secara fisik, juga sebagai insan dengan memberikan tekanan pada harkat, martabat, hak, dan kewajiban manusia yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia baik segi etika, estetika, maupun logika yang meliputi nilai-nilai rohaniah kepribadian dan kejuangan. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, sejumlah prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM yang perlu diperhatikan antara lain, sistem pendidikan dan kesehatan yang baik dan bermutu, didukung lingkungan keluarga dan masyarakat, serta peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa (*character building*).

Misi-2: Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah.

Pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat masih dihadapkan dengan kondisi ketimpangan wilayah. Salah satunya disebabkan oleh pemenuhan infrastruktur yang belum memadai di setiap wilayah, baik kecamatan maupun desa. Infrastruktur secara harfiah merupakan akumulasi komponen fisik meliputi transportasi, pengairan drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat baik dasar, sosial, maupun ekonomi yang tercakup dalam sistem fisik. Ketersediaan infrastruktur yang minim seringkali menjadi



penyebab utama mahalnya ongkos logistik di daerah dan rendahnya arus investasi yang masuk.

Oleh karena itu, pembangunan Infrastruktur salah satu menjadi fokus utama pembangunan Halmahera Barat lima tahun kedepan. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan merata akan mendorong dan menunjang perkembangan ekonomi dan keterbukaan wilayah, yang menjamin keterjalinan antara sistem lingkungan, sosial, dan ekonomi wilayah. Sejatinya, pembangunan merupakan proses perubahan menuju sesuatu yang lebih baik, meningkatkan mutu hidup rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar (*human needs*) rakyat yang lebih baik. Dalam upaya memperbaiki mutu hidup rakyat, sebagaimana tujuan dari pembangunan, maka kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi seharusnya dipelihara dari kerusakan. Pemeliharaan lingkungan hidup diupayakan dalam rangka menghindari terjadinya kepunahan kehidupan. Oleh karena itu misi pembangunan yang kedua ini menitik beratkan pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sebagai paradigma pembangunan yang berkaitan langsung dengan keseimbangan alam atau lingkungan. Pembangunan infrastruktur di Halmahera Barat dalam lima tahun berfokus pada infrastruktur yang andal, aman dan cerdas (*resilient*), ramah lingkungan, memenuhi kebutuhan manusia, serta berkelanjutan secara pembiayaan.

Misi-3: Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya.

Pertumbuhan ekonomi dengan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama dalam kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Upaya membangun kemandirian ekonomi daerah Halmahera Barat lima tahun ke depan difokuskan pada menumbuhkan ekonomi pada daerah-daerah yang memiliki potensi dan fasilitas wilayah. Potensi ekonomi unggulan yang ada di setiap wilayah perlu digali dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk menunjang pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi di wilayah



tersebut. Suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengembangan ekonomi di setiap satuan wilayah atau kawasan-kawasan wilayah pengembangan disesuaikan dengan karakteristik dari sektor-sektor potensial unggulannya, baik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya.

Misi-4: Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan damai bagi masyarakat.

Pada dasarnya, hidup di dalam sistem sosial yang baik dan bersih merupakan aspirasi dan cita-cita setiap orang. Sistem yang baik berarti sistem yang tertata dengan rapih, sistematis, memiliki daya operasional yang sinergis dan yang terpenting adalah memiliki aspek keseimbangan (*checks and balances*) secara sistemik. Sedangkan sistem yang bersih adalah, implementasi dari seluruh harapan setiap orang yang menghendaki agar sistem yang sudah baik tidak dinodai oleh tangan-tangan kotor, terjaga dari segala bentuk penyelewengan, baik yang terstruktur maupun tidak, serta tetap berjalan sesuai koridor aturan yang semestinya.

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Secara internal, faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik, yakni makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik; meningkatnya tuntutan



penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum; meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan.

Secara eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (*e-Government*) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat; makin derasnya arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat (*digital divide*). Perubahan-perubahan ini, tentunya membutuhkan aparatur negara yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan.

Dari visi dan misi di atas, kemudian implementasikan dalam Janji Kerja yang merupakan komitmen-komitmen kampanye Bupati/Wakil Bupati Terpilih untuk dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Janji kerja ini pada hakikatnya merupakan Prioritas Program/Kegiatan Unggulan Daerah sebagai bentuk pendukung langsung terhadap upaya pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026. Janji Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat terpilih sebagai Prioritas Unggulan Daerah dimaksud terdiri dari 9 (sembilan) langkah aksi, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar II.1

Kerangka Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Kesembilan langkah aksi tersebut terangkum dalam sebuah semboyan **“Diahi Halbar”**, yang bermakna “memperbaiki, dan mengakselerasi pembangunan di Halmahera Barat”, yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Halbar Pintar

- a) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sistem pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar yang berkualitas diseluruh desa;
- b) Menjamin keberlanjutan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar bagi seluruh anak;
- c) Memberikan fasilitasi beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa asal Halmahera Barat;

2. Halbar Sehat

- a) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sistem kesehatan yang berkualitas, mulai dari Poliklinik Desa, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- b) Memperluas jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat tidak mampu;



3. Halbar Religius

- a) Memperkuat peran rumah ibadah dan pusat-pusat keagamaan sebagai wadah pendidikan moral dan akhlak berkelanjutan bagi masyarakat;
- b) Memfasilitasi pemberian insentif bagi para pemimpin-pemimpin keagamaan di desa;

4. Halbar Lancar

- a) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sistem transportasi dan logistik diseluruh wilayah;
- b) Memfasilitasi penyediaan subsidi bagi simpul-simpul transportasi wilayah yang belum ekonomis;

5. Halbar Terang

- a) Meningkatkan aksesibilitas ketenaga listrikan di seluruh wilayah dengan mengutamakan pemanfaatan sumber-sumber energi baru dan terbarukan (EBT);
- b) Memfasilitasi penyambungan listrik bagi seluruh masyarakat yang tidak mampu;

6. Halbar Berdering

- a) Meningkatkan aksesibilitas fasilitas telekomunikasi seluler dan pita lebar di seluruh wilayah untuk mengakselerasi kapasitas literasi digital masyarakat;

7. Halbar Nyaman

- a) Meningkatkan fasilitasi penanganan rumah kumuh dan lingkungan kumuh, baik di perkotaan maupun diperdesaan;
- b) Meningkatkan fasilitasi pembangunan infrastruktur pencegah dan pengendali bencana di wilayah-wilayah rawan bencana, termasuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim;

8. Halbar Tumbuh

- a) Mengembangkan sentra-sentra industri rakyat berbasis klaster sesuai potensi unggulan setempat yang disertai penyediaan fasilitasi akses kepada pasar.
- b) Membangun lumbung-lumbung pangan terpadu (pertanian, peternakandan perikanan) untuk meningkatkan



- kesejahteraan petani/nelayan dan ketahanan pangan masyarakat.
- c) Membangun dan merevitalisasi destinasi-destinasi wisata bahari, wisata alam dan agrowisata;
9. Halbar Inovatif
- a) Mengembangkan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien, tepat fungsi dan struktur;
- b) Memaksimalkan satu data dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
- c) Memaksimalkan potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah;
- d) Mengefektifkan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal yang disyaratkan;
- e) Mengefektifkan sistem penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) untuk mendorong inovasi berkelanjutan bagi seluruh Aparatur pemerintahan daerah.
- f) Mengakselerasi implementasi Smart City dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke berbagai perangkat untuk mengoptimalkan efisiensi operasi dan layanan pemerintah daerah, serta terhubung dengan warga.

B. TUJUAN, SASARAN

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis masing-masing misi yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran-sasaran strategis. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yaitu berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program-program perangkat daerah.

Dari perspektif tersebut maka pelaksanaan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:



TUJUAN 1 –Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender, dengan sasaran:

Sasaran 1– Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

Sasaran 2 –Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat;

Sasaran 3 –Meningkatnya produktifitas masyarakat;

Sasaran 4 –Meningkatnya harmoni dan daya rekat sosial masyarakat;

Sasaran 5 –Meningkatnya kesetaraan gender;

TUJUAN 2– Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata, dengan sasaran:

Sasaran 6 –Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur dasar yang layak dan terjangkau;

Sasaran 7 –Meningkatnya konektifitas dan keterbukaan wilayah;

TUJUAN 3 –Mewujudkan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan serta adaptif bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran:

Sasaran 8 –Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim;

TUJUAN 4 –Mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui pemanfaatan secara optimal sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata, serta sumber daya alam strategis lainnya,dengan sasaran:

Sasaran 9– Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak;

Sasaran 10 – Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat secara berkeadilan;

TUJUAN 5 – Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, demokratis dan melayani berbasis inovasi berkelanjutan, dengan sasaran:

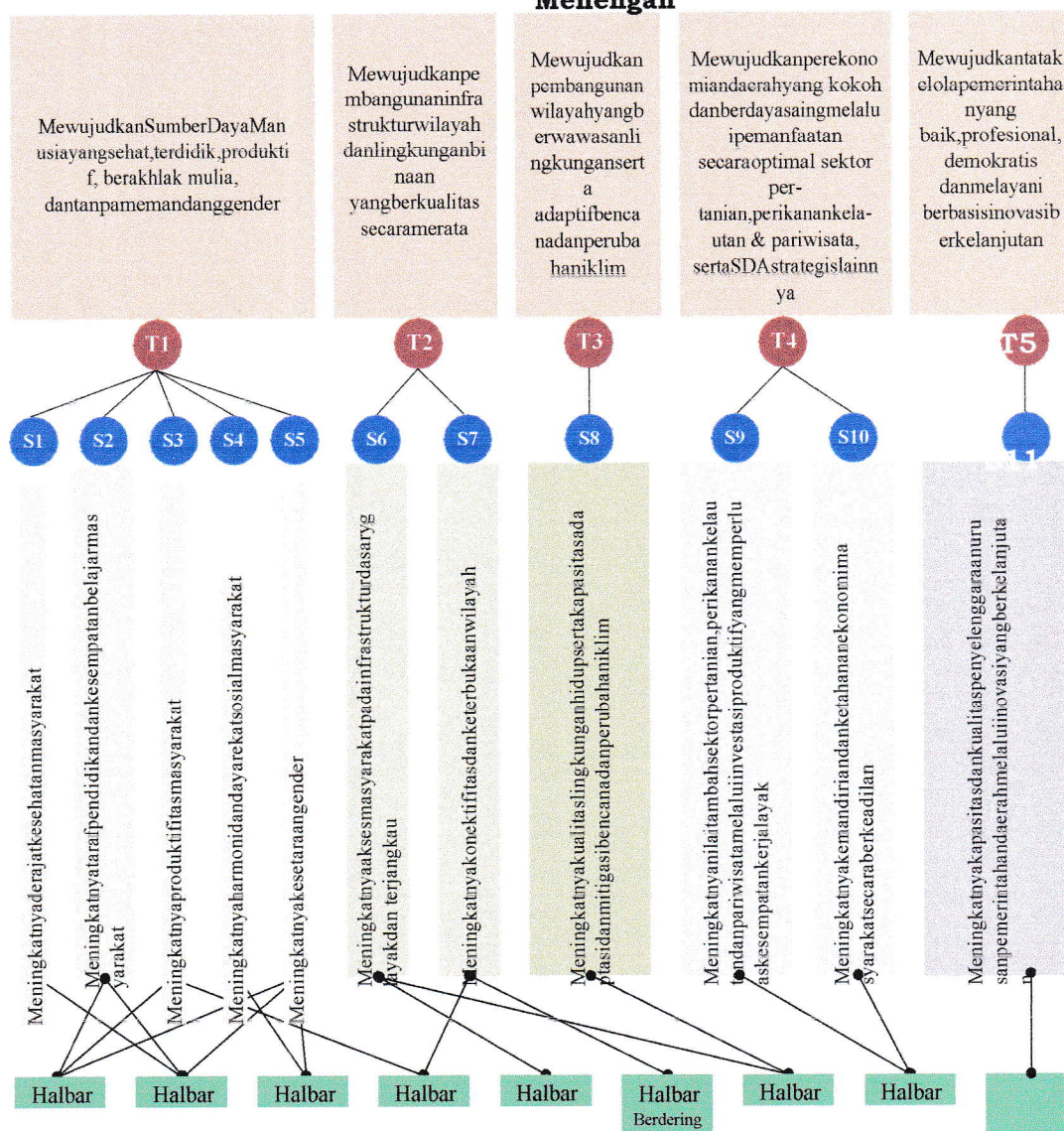
Sasaran 11 – Meningkatnya kapasitas dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui inovasi yang berkelanjutan.

Gambar berikut menyajikan keterkaitan antara janji kerja Bupati dan WakilBupati terpilih dengan tujuan dan sasaran dalam rangka

pelaksanaan misi RPJMD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026.

Gambar II.2

**Kerangka Hubungan Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka
Menengah**



C. PERJANJIAN KINERJA

Dari paparan diatas sebagaimana ringkasan/ihntisar RPJMD Kab. Halmahera Barat dalam Dokumen Perencanaan Tahun 2021-2026 yang disingkronisasikan dengan Visi dan Misi Bupati Halmahera Barat dalam dokumen jangka menengah, namun untuk menarik data sasaran dan indikator tersebut di tetapkannya Peraturan Bupati Halmahera Barat Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 tahun 2023, yang direpresentasikan tiap tahunnya dalam bentuk Perjanjian kinerja Bupati Halmahera Barat, Adapun Perjanjian Kinerja Bupati Halmahera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

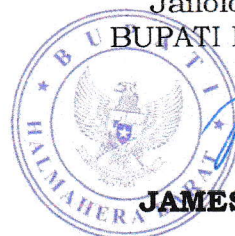


**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

No.	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Misi 1	Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan kesetaraan serta nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal		
1		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender	Indeks Pembangunan Manusia	68,54
2		Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	1. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 2. Harapan Lama Sekolah (tahun)	8,83 14,16
	Misi 2	Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah;		
3		Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur	72,50
	Misi 3	Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya		
4		Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata (persen) 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 3. Lama tinggal Wisatawan Mancanegara 4. Lama tinggal Wisatawan Nusantara	200 9000 2 3,5
5		Menurunnya Tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (persen)	7,77
	Misi 4	Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat		
6		Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
7		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	B

Jailolo, 02 Januari 2025
BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG, S.Pd., MM



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
URUSAN KESEHATAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rp. 80.224.464.156

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
URUSAN PENDIDIKAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	RP. 75.507.360.875

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
1	ROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	RP. 63.680.911.545.

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp. 12.250.000.000

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL		
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	RP. 2,864,884, 600

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	BELANJA DAERAH	Rp. 1.178.265.558.952.
2	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH/PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	Rp. Rp 3.817.368,40
3	PENATAAN ORGANISASI	RP. 9.000.000

Jailolo, 02 Januari 2025
BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG, S.Pd., MM



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ) Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Laporan Instansi Pemerintah.

Dengan mengacu pada regulasi tersebut, metode yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja tetap menggunakan metode perbandingan capaian kinerja. Metode perbandingan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*Performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai setiap organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis baik terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) maupun terhadap keberhasilan capaian dan beberapa tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan deskripsi kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tahapan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran dimulai dari pengukuran kinerja yang telah rencanakan sebelumnya, kemudian atas rumusan capaian kinerja tersebut maka dilakukan analisis keterkaitan antara sasaran yang ingin dicapai dengan indikator yang termuat pada setiap sasaran.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja sasaran dengan membandingkan antara indikator yang telah dicapai dan yang belum mencapai target. Dengan demikian dalam uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini hanya menguraikan gambaran umum capaian kinerja dari setiap sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator kinerja diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

85-100	= Sangat Baik,
70-84	= Baik
50 – 69	= Cukup Baik
< 49	= Kurang Baik



- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} = X 100 \%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} = X 100 \%$$

Analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Laporan Instansi Pemerintah. Hasil analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 tidak lepas dari Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021– 2026 yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan lainnya yaitu :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025.
2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 – 2026.
3. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tanggal 2 Januari Tahun 2025.

Berdasarkan visi dan misi Bupati Halmahera Barat Maluku Utara yang dijabarkan dalam sasaran dan indikator kinerja yang terukur, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai pencerminan dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat 2021 – 2026 maka analisis capaian kinerja



Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut:

MISI PERTAMA : MEMBANGUN MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN BERAHLAK MULIA BERLANDASKAN KESETARAAN SERTA NILAI-NILAI LUHUR AGAMA, PANCASILA DAN KEARIFAN LOKAL

Dimana untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026 ditetapkan 4 Misi dan 7 Sasaran sebagaimana yang termaktub dalam rincian pembahasan komprehensif sebagai berikut :

Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Halmahera Barat sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan kesetaraan serta nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal;
2. Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah;
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya; dan
4. Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat

Program prioritas pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2024 mengacu pada Visi dan Misi sebagaimana yang terimplementasikan dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat, serta dalam rangka untuk mendukung prioritas program nasional dan prioritas program provinsi maluku utara. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan cakupan ini diukur melalui analisa kinerja pencapaian program yang dilaksanakan setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025. Adapun Sasaran Dari Tujuan tersebut dalam Misi Pertama sebagaimana yang termaktub dalam Perjanjian Kinerja Bupati Halmahera Barat di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Sasaran Ke 1****Sasaran Ke-1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender**

Tabel : III.1

No	Sasaran	indikator	Target
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender	Indeks Pembangunan Manusia	68,54

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk dari tiga dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. IPM digunakan sebagai proxy untuk mengukur keberhasilan Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender. Disebut proxy karena dari tiga dimensi yang membentuk IPM, terdapat dua dimensi yang memiliki relevansi langsung terhadap substansi pada misi pembangunan yang pertama, yaitu Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan. Adapun dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan oleh Pengeluaran per Kapita Riil disesuaikan tidak digunakan sebagai indikator dalam sasaran-sasaran pada Tujuan 1, tetapi akan diproxikan oleh indikator Pertumbuhan Produktivitas Total Daerah. IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks pengeluaran (standar hidup layak). Adapun rumus formula IPM adalah sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Kesehatan} \times I_{Kesehatan}} \times 100$$

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel: III.2

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

No	Sasaran	indikator	Target	Realisasi
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender	Indeks Pembangunan Manusia	66,54	67,53

Dari Sasaran Pertama Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam Perjanjian kinerja Bupati Halmahera Barat mencapai target yang diperjanjikan dari target **66,54** mencapai target **69,20** Dalam artian apa yang diharapkan lebih mencapai target yang diperjanjikan.



b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Adapun perbandingan antara tahun ini dan tahun lalu adalah sebagaimana uraian pada tabel dibawah :

Tabel: III.3

No	Sasaran						Indikator	Target	Capaian	Realisasi
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender						Indeks Pembangunan Manusia	66,54	69,20	104,00%.
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	
	2023			2024			2025			
	67,73	68,56	101%	66,81	69,20	104%	66,54	67,53	104,00%.	

Pengukuran perbandingan dalam pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa dilihat dalam perhitungan dari BPS Halmahera Barat sebagai data Pembanding sebagaimana yang termaktub dalam tabel berikut :

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2020–2024 Human Development Index by Regency/Municipality in Maluku Utara Province, 2020–2024

Tabel: III.4

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	66,96	67,20	67,84	68,56	69,20
Halmahera Tengah	67,97	68,38	68,95	69,95	70,94
Kepulauan Sula	65,72	65,99	66,90	67,49	68,19
Halmahera Selatan	65,42	65,88	66,78	67,55	68,43
Halmahera Utara	68,26	68,58	69,13	69,79	70,52
Halmahera Timur	67,47	67,70	68,62	69,48	70,35
Pulau Morotai	63,69	64,09	64,99	65,93	66,91
Pulau Taliabu	62,50	62,75	63,65	64,31	64,88
Kota Ternate	80,32	80,63	81,28	81,79	82,59
Kota Tidore Kepulauan	71,57	72,04	72,57	73,40	74,01
Nama Provinsi	69,30	69,56	70,26	70,98	71,84

Sumber Data : Bps Halmahera Barat (<https://halbarkab.bps.go.id/publikasi.html>)



c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Adapun bentuk perbandingan capaian kinerja dengan dokumen strategis RPJMD Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel: III.5

No	Sasaran	Indikator	Realisasi
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender	Indeks Pembangunan Manusia	100%
TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN DALAM DOKUMEN RPJMD			
2022	2023	2024	2025
66,92	67,73	69,20	68,54
REALISASI KINERJA			
2022	2023	2024	2025
102%	101%	101%	104%

Sumber data : RPJMD Pemerintah Kab. Halmahera Barat 2021-2026

d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator gabungan dari beberapa indikator, yaitu Indikator kesehatan (ditunjukkan dengan indeks angka harapan hidup waktu lahir), indikator pendidikan (ditunjukkan dengan indeks angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indikator ekonomi (ditunjukkan dengan konsumsi per kapita yang disesuaikan/indeks daya beli penduduk). Ketiga indikator ini dianggap dapat mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah.

Pada dasarnya IPM merupakan indeks yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama sebagai alat pembanding ini sejalan dengan fungsi indeks mutu hidup (IMH) atau *Physical Quality of Life Index* (PQLI) pada masa lalu. IMH disusun dari tiga komponen, yaitu: angka kematian bayi, angka harapan hidup umur satu tahun, dan angka melek huruf. Salah satu kritik mendasar terhadap IMH adalah bahwa dua komponen pertamanya kurang lebih mengukur hal yang sama, seperti dibuktikan oleh kuatnya korelasi antar keduanya, sehingga cukup diwakili satu saja.



Adapun **Keberhasilan** Dalam perjanjian kinerja ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sudah mewakili beberapa unsur IPM sebagaimana yang disebut diatas, namun melihat dari capaian kinerja Bupati Halmahera Barat Tahun 2025 terkait peningkatan IPM sangatlah signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dalam artian sasaran Pertama Visi Bupati ini tercapai sesuai dengan harapan yang ditargetkan. Bukti capaian tersebut bisa dilihat pada tabel diatas dimana terdapat link tautan alamat *website* BPS Halmahera Barat dalam bukunya **Halbar Dalam Angka** untuk angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Halmahera Barat.

Adapun **kegagalan** dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Halmahera Barat adalah dibidang Ekonomi yaitu daya beli masyarakat yang menurun sehingga terjadi inflasi ketidakstabilan perekonomian hal ini terjadi karena Kabupaten Halmahera Barat merupakan daerah termahal ekonominya di Indonesia dibandingkan daerah pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi belum lagi warga penduduk di wilayah Halmahera Barat rata-rata sumber mata pencarian masyarakat adalah sebagai petani dan nelayan dimana pendapatan mereka menunggu musim panen bagi petani dan musim ikan dilaut bagi nelayan untuk bisa memanfaatkan pendapatan mereka sehingga bisa terciptanya angka penurunan terhadap perekonomian masyarakat pada umumnya. Namun untuk mengukur capaian Kinerja IPM diambil dari Programnya Dibidang Kesehatan Pemerintah kabupaten Halmahera Barat;

Adapun program sasaran kegiatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 adalah sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel: III.6

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
URUSAN KESEHATAN		
1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 80.224.464.156
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp. 75.507.360.875

Sumber data : BPKD Kab. Halmahera Barat.



Sasaran Ke 2

Sasaran Ke-2 Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat

Tabel: III.7

No	Sasaran	indikator	Target
2	Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	1. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 2. Harapan Lama Sekolah (tahun)	8,83 13,24

IRLS adalah Indeks Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung dengan formula:

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$$

Dimana:

- RLS = Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
- RLSMin = Standar UNDP (0)
- RLSMax = Standar UNDP (15 tahun)

Sedangkan IHLS adalah Indeks Harapan Lama Sekolah yang dihitung dengan formula:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{Min}}{HLS_{Max} - HLS_{Min}}$$

Dimana:

- RLS = Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
- RLSMin = Standar UNDP (0)
- RLSMax = Standar UNDP (18 tahun)

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut:

Tabel: III.8

No	Sasaran	indikator	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	1. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 2. Harapan Lama Sekolah (tahun)	8,83 14,16	8,59 13,25	97,39%. 93,65%.

Dari sasaran Kedua Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam Perjanjian kinerja Bupati Halmahera Barat mencapai target yang diperjanjikan dari target rata-rata lama sekolah (Tahun) dengan target 8,83 mencapai target 8,59 Dalam artian apa yang diharapkan dalam Perjanjian Kinerja mencapai target yang diperjanjikan yakni **97,39 %** dari target dan realisasi sedangkan harapan lama sekolah (tahun) dari yang di perjanjian 14,16 dan mencapai target dengan nilai 13,25, hal tersebut mencapai target yang diperjanjikan **93,25%** indikator tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam pengukuran dan perhitungan data dari BPS Halmahera Barat sebagaimana yang termaktub dalam tabel berikut:



Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Maluku Utara

Tabel: III.9

Wilayah	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)	
	2025	
Halmahera Barat		8,60
Halmahera Tengah		9,21
Kepulauan Sula		9,20
Halmahera Selatan		8,43
Halmahera Utara		8,84
Halmahera Timur		9,07
Pulau Morotai		7,91
Pulau Taliabu		8,15
Ternate		12,09
Tidore Kepulauan		10,18
Maluku Utara		9,50

Sumber data: <https://malut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYyIzI=/rata-rata-lama-sekolah-menurut-Kabupaten-kota-tahun-.html>

Sedangkan harapan lama sekolah (tahun) bisa dilihat pada tabel berikut :
Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) 2022-2024

Tabel: III.10

Wilayah	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)	
	2025	
Halmahera Barat		13,26
Halmahera Tengah		13,69
Kepulauan Sula		13,16
Halmahera Selatan		13,05
Halmahera Utara		13,81
Halmahera Timur		13,01
Pulau Morotai		13,19
Pulau Taliabu		12,89
Ternate		15,93
Tidore Kepulauan		14,50
Maluku Utara		13,76

Sumber data: Bps Halmahera Barat <https://malut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYyIzI=/rata-rata-lama-sekolah-menurut-Kabupaten-kota-tahun-.html>



b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Adapun perbandingan antara tahun ini dan tahun lalu adalah :

Tabel: III.11

No	Sasaran						Indikator	Target	Capaian	Realisasi
2	Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat						1. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,83	8,60	97,39%.
							2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,16	13,26	93,65%.
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	
	2022			2023			2024			
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			
	8,57	8,57	100%	8,58	8,58	100%	8,58	8,59	100%	

	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi
	2022			2023			2024		
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)			Harapan Lama Sekolah (Tahun)			Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	13,23	13,23	100%	13,24	13,24	100%	13,24	13,25	100%

Adapun pencapaian kinerja antara tahun ini dengan beberapa tahun yang lalu dapat dilihat dari tabel data BPS Halmahera Barat sebagai berikut:

Rata-rata lama sekolah Kabupaten/kota Maluku Utara

Tabel: III.12

Wilayah	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
	2022	2023	2024
Halmahera Barat	8,57	8,58	8,59
Halmahera Tengah	9,02	9,19	9,20
Kepulauan Sula	9,02	9,04	9,17
Halmahera Selatan	8,16	8,17	8,42
Halmahera Utara	8,63	8,65	8,67
Halmahera Timur	8,52	8,66	8,88
Pulau Morotai	7,42	7,55	7,73
Pulau Taliabu	7,94	7,97	7,99
Ternate	12,06	12,07	12,08
Tidore Kepulauan	9,96	9,97	10,12
Maluku Utara	9,24	9,26	9,37

sumber data: Bps Halmahera Barat <https://malut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYyIzI=/rata-rata-lama-sekolah-menurut-Kabupaten-kota-tahun-.html>)



Sedangkan harapan lama sekolah (tahun) bisa dilihat pada tabel berikut :

Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) 2021-2023

Tabel: III.13

Wilayah	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
	2021	2022	2023
Halmahera Barat	13,20	13,23	13,24
Halmahera Tengah	13,11	13,22	13,23
Kepulauan Sula	12,77	12,96	12,97
Halmahera Selatan	12,79	12,97	13,03
Halmahera Utara	13,61	13,67	13,68
Halmahera Timur	12,76	12,86	12,87
Pulau Morotai	12,93	12,97	12,99
Pulau Taliabu	12,65	12,86	12,87
Ternate	15,75	15,76	15,76
Tidore Kepulauan	14,32	14,36	14,48
Maluku Utara	13,68	13,73	13,74

sumber data: Bps Halmahera Barat (<https://malut.bps.go.id/indicator/26/261/1/harapan-lama-sekolah-menurut-Kabupaten-kota-tahun-.html>)

- d) **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Adapun bentuk perbandingan capaian kinerja dengan dokumen strategis RPJMD Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel: III.14

No	Sasaran	Indikator	Realisasi
2	Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	1. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 2. Harapan Lama Sekolah (tahun)	100%
TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN DALAM DOKUMEN RPJMD			
	2023	2024	2025
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
	8,60	8,72	8,83
	REALISASI KINERJA		
	2023	2024	2025
	100%	99%	97,39%
	2023	2024	2025
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	13,83	13,99	14,16
	REALISASI KINERJA		
	2023	2024	2025
	97%	95%	93,65%

Sumber data : RPJMD Pemerintah Kab. Halmahera Barat 2021-2026

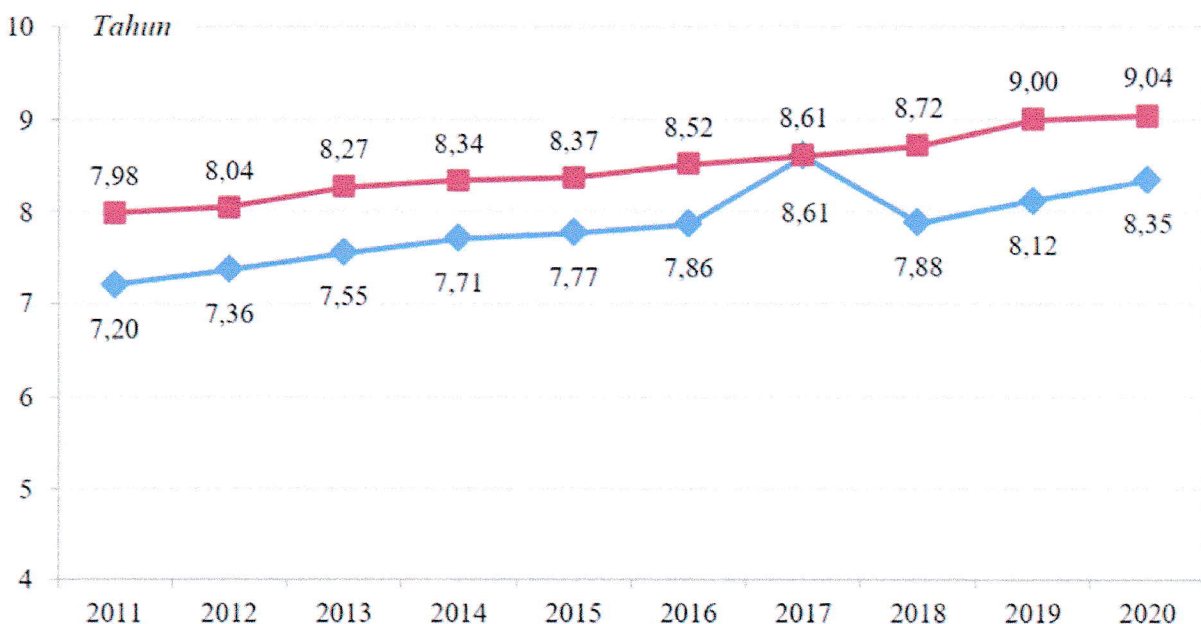


e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dalam dimensi pengetahuan yang membentuk IPM. RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Dalam perhitungannya, lama sekolah selama 6 untuk penduduk yang tamat SD, 9 tahun untuk tamat SMP dan 12 tahun untuk tamat SMA, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Seiring dengan program wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2015 maka idealnya RLS minimal adalah 12 tahun. Angka RLS Kabupaten Halmahera Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak 2011 sehingga mencapai angka tertingginya 8,35 tahun di tahun 2020.

Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia > 25 tahun di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2019 telah menempuh pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II). Tren kenaikan ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas dan daya saing sumber daya manusia Halmahera Barat yang lebih baik. Namun demikian, sebagaimana grafik dalam Gambar capaian RLS Kabupaten Halmahera Barat masih tetap konsisten berada di bawah RLS provinsi Maluku Utara dalam 10 tahun terakhir.

Grafik: III.1



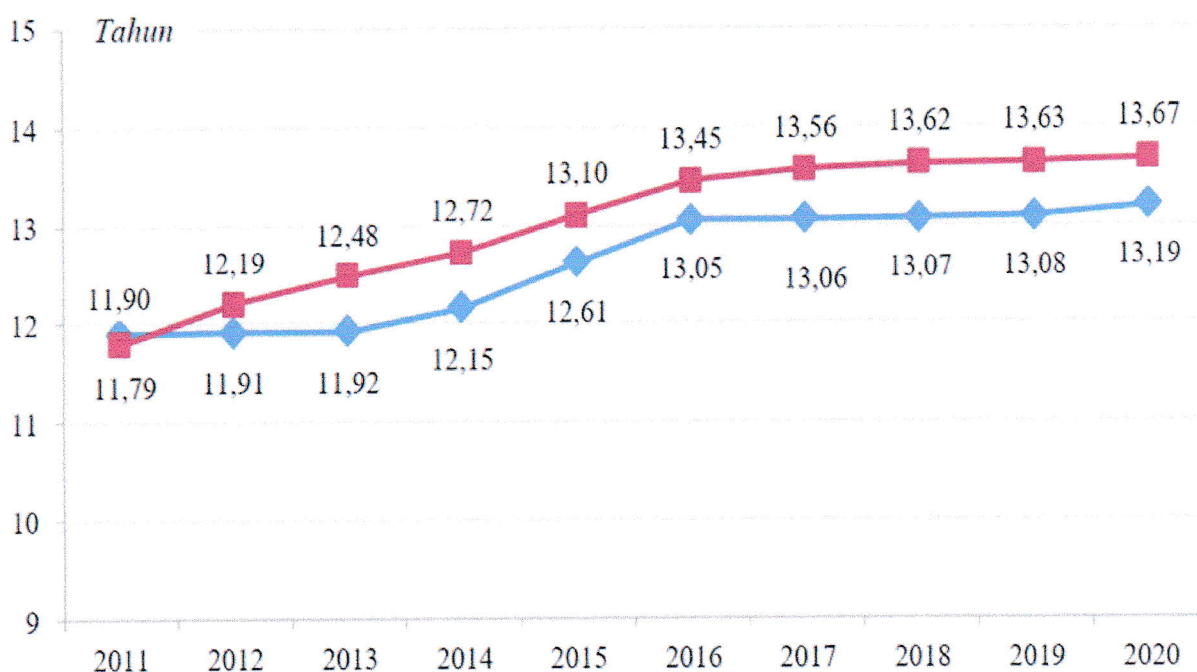
Sumber data BPS. Kab. Halmahera barat



Selain rata-rata lama sekolah, komponen lain dalam dimensi pengetahuan yang membentuk IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dimulai pada usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal, yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh seorang anak pada umur tertentu di masa mendatang. Berdasarkan definisi tersebut, pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Halmahera Barat usia tertentu (>7 tahun) berpotensi menempuh pendidikan hingga lulus SMA/ sederajat dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke tingkat setara Diploma I. Hal ini dapat dilihat dari angka HLS yang mencapai 13,19 tahun 13 tahun.

Namun demikian, sebagaimana tersaji dalam Gambar angka HLS Kabupaten Halmahera Barat masih konsisten berada di bawah rata-rata provinsi Maluku Utara dalam sembilan tahun terakhir:

Grafik :III.2



Sumber data : BPS. Kab. Halmahera Barat.

Salah satu komponen dimensi pengetahuan yang sudah tidak diperhitungkan sebagai pembentuk IPM berdasarkan metode baru, masih relevan untuk didiskusikan adalah Angka Melek Huruf (AMH). Angka melek huruf menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Penduduk yang bisa membaca dan menulis memiliki akses ke berbagai hal yang



jauh lebih besar. Angka melek huruf yang semakin besar diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan dapat semakin meningkat. Berdasarkan definisinya, Angka Melek Huruf menggambarkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin dan lainnya dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 telah mencapai 98,70 persen atau naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 98,06 persen. Namun capaian di tahun 2020 ini masih lebih rendah dari Angka Melek Huruf pada rata-rata provinsi yang sudah mencapai 98,77 persen.

Adapun **Keberhasilan** Tahun **2025** ini angka Dari sasaran Kedua Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam Perjanjian kinerja Bupati Halmahera Barat mencapai target yang diperjanjikan dari target rata-rata lama sekolah (Tahun) dengan target **8,83** mencapai target **8,59** Dalam artian apa yang diharapkan dalam Perjanjian Kinerja mencapai target yang diperjanjikan yakni **97,39 %** dari target dan realisasi sedangkan harapan lama sekolah (tahun) dari yang di perjanjian **14,16** dan mencapai target dengan nilai **13,25**, hal tersebut mencapai target yang diperjanjikan **93,65%** indikator tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam pengukuran dan perhitungan data dari BPS Halmahera Barat sebagaimana tabel diatas.

Adapun **keberhasilan** sebagai berikut:

- 1) Sejak Tahun 2010 hingga ditahun 2025 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memprioritaskan CPNSD bagi Pelamar guru yang ditempatkan seluruh kecamatan yang ada di Halmahera Barat, begitu juga dengan di tahun 2025 Bupati Halmahera Barat mengambil Kebijakan untuk mengangkat Tenaga Honorer Guru menjadi Pegawai Perjanjian Kontrak P3K yang dilantik dan menjadi Guru Sekolah;
- 2) Setiap Tahun Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat membangun dan merehabilitasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan dan membangun sekolah baru jika terjadi kerusakan berat hal tersebut bisa dilihat dari Anggaran Pembangunan Sekolah pada daftar terampir;

Adapun **kegagalan** Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, maka beberapa permasalahan perlu untuk segera di selesaikan antara lain:



- 1) Anggaran adalah salah satu faktor penunjang peningkatan kinerja, keterlambatan pada tahapan pencairan masih dialami sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan tidak optimal;
- 2) Belum optimalnya pendidikan karakter bangsa dapat dilihat dari rata – rata lama sekolah yang meningkat dari tahun sebelumnya tapi masih berada di bawah provinsi dan beberapa kab/Kota yang ada di Maluku utara.
- 3) Belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan ini dapat dilihat dari angka APS, APK dan APM yang masih Fluktuasi dalam 4 Tahun Terakhir
- 4) Berdasarkan PERMENDIKBUD No 22 Tahun 2016 maka dapat disampaikan bahwa untuk rombongan belajar SD dan SMP masih berada di bawah ketentuan maksimum yaitu SD 28 dan SMP 32.

Dari deskripsi gambaran tersebut diatas bahwa dalam Sasaran kedua ***“Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat”*** Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Mencapai tahapan dalam yang ditargetkan dalam kinerja untuk prioritas perkembangan di dunia pendidikan.

Adapun program sasaran kegiatan Meningkatkan taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 adalah sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel: III.15

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
URUSAN PENDIDIKAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	RP. RP. 75.507.360.875

Sumber data : BPKD Kab. Halmahera Barat.



MISI KEDUA : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENGAKSELERASI KETERBUKAAN DAN DAYA SAING WILAYAH;

Sasaran Ke 3

Sasaran Ke-3 Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata.

Tabel: III.16

Sasaran Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata

No	Sasaran	indikator	Target
3	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur	72,50

Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) merupakan indikator komposit yang menggambarkan perkembangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar maupun infrastruktur penunjang konektifitas wilayah di Halmahera Barat. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) dihitung menggunakan formula:

$$IPI = \left(\sqrt[3]{IID \times IW} \right) \times 100$$

Dimana :

IID = Indeks Infrastruktur Dasar

IW = Indeks Infrastruktur Wilayah.

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Adapun target dan realisasi pada capaian realisasi sasaran 7 mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata adalah sebagai tabel berikut:

Tabel: III.17

No	Sasaran	indikator	Target	Realisasi
3	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur	72,50	113

Dalam capaian sasaran kinerja Ke_3 yakni **“Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata”** dengan indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur dalam hal ini bupati Halmahera Barat dalam Perjanjiannya adalah membangun jalan sebagai



penghubung antara wilayah guna untuk kemudahan akses bagi masyarakat dan pengguna jalan pada umumnya, Indikator pembangunan bidang jalan dan jembatan meliputi panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan, jumlah jembatan yang dibangun, jumlah ruas jalan yang dilakukan pemeliharaan, jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan, pelaksanaan survei database jalan dan jembatan, serta penyusunan perencanaan teknis jalan dan jembatan; keseluruhan indikator indeks Infrastruktur ini berfungsi sebagai tolok ukur capaian kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur transportasi yang memadai, mendukung mobilitas masyarakat, serta memastikan keberlanjutan dan kualitas pelayanan publik di sektor pekerjaan umum. dari progres perencanaan bupati terhadap pemantapan jalan yang direncanakan yaitu dengan target **72,50%** luas infrastruktur jalan, dalam capaian tersebut progres yang dicapai adalah **113%**. dalam artinya bahwa bupati mampu mempertanggungjawabkannya kinerjanya sesuai PK yang di janjikan dan bahkan kinerja tersebut melebihi target yang ditentukan, pada cakupan ini Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berhak mendapatkan predikat baik atas progres kinerja yang melebihi target. Dalam hal tersebut dapat dipertanggungjawabka melalui dokumen LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

Meningkatnya kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
1	Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan	Km	17	13,5	80
2	Jumlah jembatan/deker yang dibangun	Bh	2	3	150
3	Jumlah Ruas Jalan yang dilakukan pemeliharaan	Ruas	2	5	250
4	Jumlah Jembatan yang dilakukan pemeliharaan	buah	1	0	0
5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	5	5	100
6	Survei kondisi jalan dan jembatan	Dokumen	1	1	100

Sumber Data: Lakip Dinas PUPR



Jika target capaian yang ditetapkan dalam perjanjian adalah 72,50 sedangkan hasil perhitungan rata-rata capaian dari tabel adalah 113, maka capaian terhadap target dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned}\text{Capaian terhadap target} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{113,33}{71,50} \times 100\% \\ &\approx 158,6\%\end{aligned}$$

Jadi, capaian indeks infrastruktur terhadap target perjanjian adalah sekitar **158,6%**. Artinya, kinerja infrastruktur tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian.

Adapun bukti dokumentasi yang disajikan sebagai berikut :

Gambar: III.1

Gambar pada Lokasi jalan Sebelum pengaspalan



1,13082N 127,48067E
Paket : Jalan Hotmix Jailolo-Ibu
pekerjaan : Cutter Kota Jailolo
STA :
Fisik :
Segmen :



1°4'20.351"N 127°28'19.589"E

Kabupaten Halmahera Utara
PENINGKATAN JALAN RUAD DALAM KOTA JAILOLO
SEGMENT SOAKONORA GUFASA
KEGIATAN ASPAL
STA



1,21722N 127,53863E

Kabupaten Halmahera Barat
Paket : Jalan Hotmix Jailolo-Ibu
pekerjaan : LPA
STA :
Fisik :
Segment :

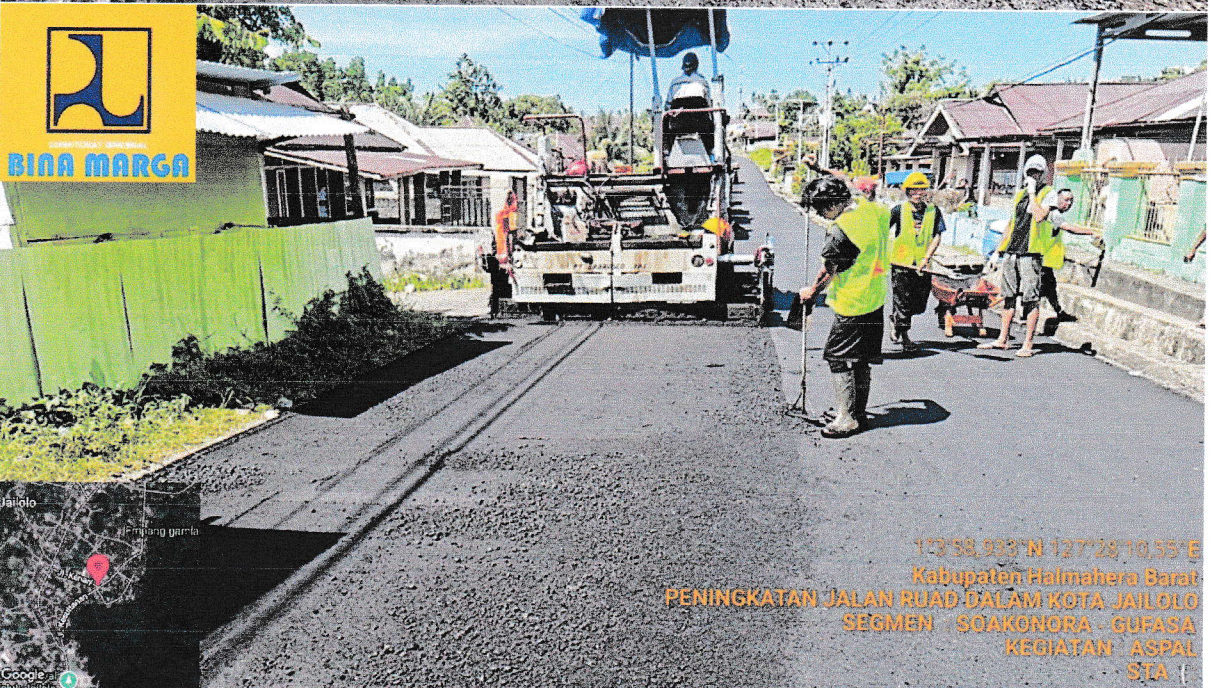


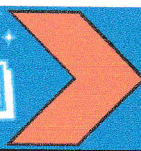


1°423.866' N 127°29'14.523' E
PENINGKATAN JALAN RUAD DALAM KOTA JAILOLO
SEGMENT SOAKONORA GUPASA
KEGIATAN HARS BASE
STA

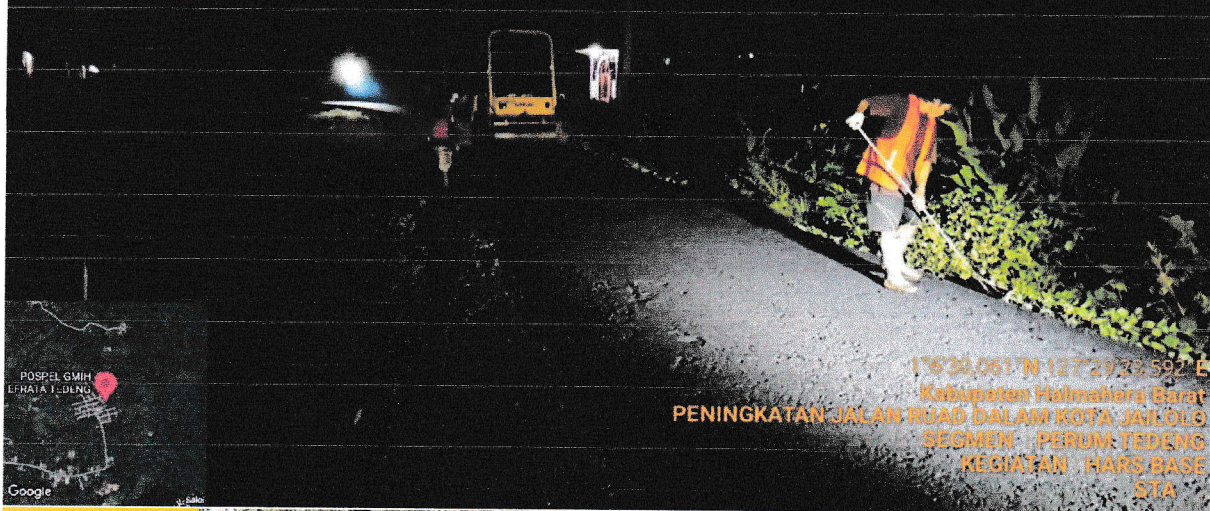


1°630.307' N 127°29'23.604' E
Kabupaten Halimaera Barat
PENINGKATAN JALAN RUAD DALAM KOTA JAILOLO
SEGMENT PERUM TEDENG
KEGIATAN PRIME COAT
STA





BINA MARGA



1°53'06.1" N 127°29'33.592" E

Kabupaten Halmahera Barat

PENINGKATAN JALAN RUAD DALAM KOTA JAILOLO

SEGMENT PERUM TEDENG

KEGIATAN HARS BASE

STA



BINA MARGA



1°47'39.7" N 127°13'19.43" E

PENINGKATAN JALAN RUAD DALAM KOTA JAILOLO

SEGMENT SOAKONORA DUFASA

KEGIATAN ASPAL

STA

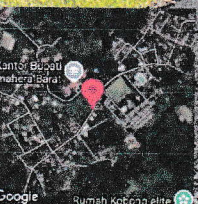




BINA MARGA



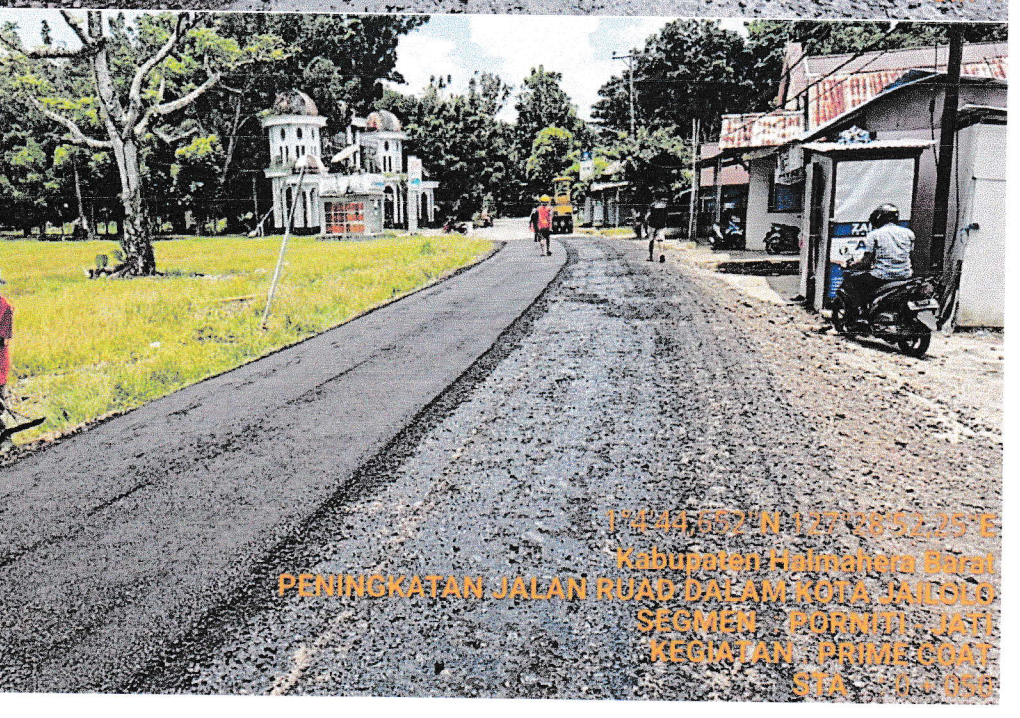
BINA MARGA



BINA MARGA

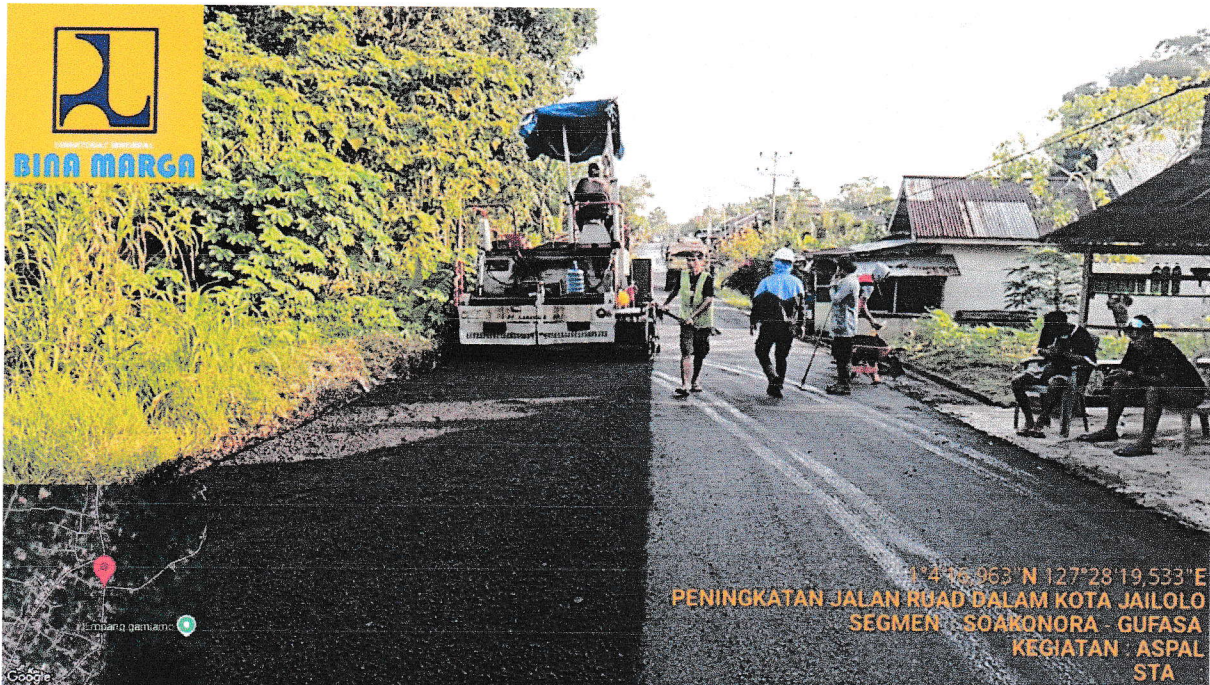


7°21'34"N 127°29'27"E
Kabupaten Halmahera Barat
PENINGKATAN JALAN RUMAH DALAM KOTA JAILOLO
SEGMENT PERUM TEDENG
KEGIATAN PRIME COAT
STA 0+000



1°44'52"N 127°28'52.25"E
Kabupaten Halmahera Barat
PENINGKATAN JALAN RUMAH DALAM KOTA JAILOLO
SEGMENT PORNIJI JATI
KEGIATAN PRIME COAT
STA 0+000





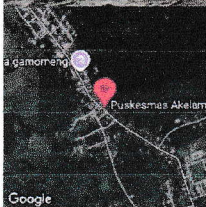


14:52

04/12/2025

Kamis

Jl. Sarikat No.8, Jailolo, West Halmahera
Regency, North Maluku



1°8'5"N 127°28'18"E
294° NW

Kabupaten Halmahera Barat
PENINGKATAN JALAN RUAS AKELAMO - SUSUPU
Selasa, 24 Februari 2026



1°4'12.712" N 127°28'19.371" E
PENINGKATAN JALAN RUAD DALAM KOTA JAILOLO
SEGMENT SOAKONORA - GUFASA
KEGIATAN ASPAL
STA



Paket : Jalan Hotmix Jailolo-Ibu
pekerjaan : LPA Goal
STA :
Fisik :
Segmen :





b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun capaian target kinerja dalam tahun ini dengan tahun yang lalu adalah sebagai berikut:

Tabel: III.18

No	Sasaran						Indikator	Target	Capaian	Realisasi
3	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata						Indeks Pembangunan Infrastruktur	70,57	78,28	111%
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian		Realisasi
	2023			2024			2025			
	62,57	62,97	101%	70,57	78,28	101%	72.50	113		158%

c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Adapun bentuk perbandingan capaian kinerja dengan dokumen stragis RPJMD Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel: III.19

No	Sasaran	Indikator	Realisasi
3	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur	100%
TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN DALAM DOKUMEN RPJMD			
	2023	2024	2025
	59,17	62,57	73,81
REALISASI KINERJA			
	2023	2024	2025
	101%	116%	158%

Sumber data : RPJMD Pemerintah Kab. Halmahera Barat 2021-2026

f) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Halmahera Barat merupakan daerah kepulauan yang terletak diwilayah Provinsi Maluku utara, lintas pusat kota di Ternate menuju ke Halmahera Barat bisa di tempuh dengan jalur perhubungan laut, namun Kabupaten Halmahera Barat sendiri merupakan 1 (satu) daratan dengan ibu kota Provinsi dan Kabupaten lainnya seperti, Halmahera Timur, Utara, Tengah dan Selatan. Namun pulau Halmahera merupakan daerah pergunungan dan masih alamiah kondisi alamnya, hingga saat ini untuk menuju akses ke berbagai lintas Kabupaten/kota diperlukan proses pemantapan jalan dan aspal yang memadai.

Indeks Pembangunan Infrastruktur khususnya pembangunan jalan memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan jangka pendek menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dan jangka menengah dan panjang



akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait. Infrastruktur Pembangunan jalan seperti ini menjadi jawaban dari setiap kebutuhan bagi negara yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi, untuk dapat membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung tumbuhnya pusat ekonomi dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa. Problemnya terhadap kegagalan dalam pembuatan jalan adalah pembangunan infrastruktur membutuhkan modal besar yang signifikan, yang sering tidak selalu diikuti oleh loncatan perolehan nilai tambahnya (*value added*).

Faktor keberhasilan terhadap Indeks Pembangunan Infrastruktur terhadap jalan yakni ;

1. Faktor Keberhasilan Indeks Infrastruktur:
2. Kelebihan realisasi pada indikator tertentu Pemeliharaan ruas jalan (250%) dan pembangunan jembatan/deker (150%) jauh melampaui target, sehingga menaikkan rata-rata capaian.
3. Konsistensi pada dokumen perencanaan Penyusunan rencana, kebijakan, dan survei kondisi jalan/jembatan tercapai 100%, menunjukkan komitmen administratif yang kuat.
4. Efisiensi pelaksanaan Meski panjang jalan yang dibangun hanya 80% dari target, indikator lain menutupi kekurangan tersebut sehingga total capaian tetap tinggi.
5. Keseimbangan antara fisik dan administratif Keberhasilan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari dokumen perencanaan dan survei yang mendukung keberlanjutan.

Faktor gagal karena berbagai faktor yakni karena ;

1. Perencanaan yang buruk, pemilihan kontraktor yang salah, dan faktor lingkungan;
2. Faktor perencanaan Terselesa-terselesa dalam perencanaan, Kurang kajian dan koordinasi, Tidak mengikuti Kerangka Acuan Kerja (TOR), Kesalahan dalam penulisan spesifikasi teknik;
3. Faktor pemilihan kontraktor Memilih kontraktor yang tidak kompeten atau tidak berpengalaman;
4. Faktor lingkungan Tanah tidak stabil Ketinggian air tanah rendah Ancaman bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor;
5. Faktor Manajemen proyek yang tidak cermat dan tidak terkoordinasi, Kurangnya peran serta pengguna jasa, Kurangnya komitmen manajemen pada pelaksana proyek, Kurangnya penetapan tujuan yang jelas.
6. Tidak tercapainya pemeliharaan jembatan Target 1 buah jembatan untuk pemeliharaan tidak terealisasi sama sekali (0%), menunjukkan adanya kendala teknis atau keterbatasan sumber daya.
7. Realisasi pembangunan jalan di bawah target Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan hanya 13,5 km dari target 17 km (80%), menandakan adanya hambatan dalam pelaksanaan fisik.



8. Ketidakseimbangan capaian antar indikator Beberapa indikator sangat tinggi (250%, 150%), sementara yang lain rendah atau nol. Ketidakseimbangan ini menunjukkan perencanaan dan eksekusi belum merata.
9. Keterbatasan dalam pengawasan lapangan Meski dokumen perencanaan dan survei tercapai 100%, hasil fisik tertentu tidak sesuai target, menandakan adanya gap antara perencanaan dan implementasi.

Dalam indikator Indeks pembangunan Infrastruktur khususnya pembuatan jalan Bupati Halmahera Barat merepresentasikan perjanjian kerjanya untuk tahun 2025 untuk memprioritaskan terhadap pemantapan jalan lingkup Halmahera Barat, walaupun dari segi biaya yang sangat besar namun sangat berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan infrastruktur di Halmahera barat ditahun 2025 melebihi target baik dalam Perjanjian Kinerja maupun target dalam dokumen perencanaan RPJMD Kab. Halmahera barat tahun 2021-2026.

Adapun program dan kegiatan dalam mencapai target Indek Infrastruktur Khususnya Pembuatan Jalan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel: III.20

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
1	ROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	RP. 63.680.911.545.



MISI KETIGA : MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH DENGAN MENSINERGIKAN SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN,

Sasaran Ke 4

Sasaran Ke-4 :Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak

Tabel: III.21

No	Sasaran	indikator	Target
4	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata (persen)	17,91

Pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata dihitung menggunakan formula:

$$PNT_{Pr} = \left(\frac{PDRBP_{Pr} - PDRBP_{Pr-1}}{PDRBP_{Pr-1}} \right) \times 100\%$$

Dimana :

PNTPr = Pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata

PDRBPr = PDRB ADHK Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi & Makan Minum

t = Tahun yang ditinjau

Dalam capaian pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata (persen) maka Sasaran Strategis yang di pergunakan untuk mencapai formula tersebut adalah :

Tabel: III.22

No	Sasaran	indikator	Target
4	Peningkatan Angka Kunjungan	1.Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	200
		2.Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	9000
		3.Lama tinggal Wisatawan Mancanegara	2
		4.Lama tinggal Wisatawan Nusantara	3,5

Sasaran Strategis ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa sasaran ini merupakan variabel penting bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam menjadi tolak ukur kinerja Bupati, mengingat pentingnya peningkatan dan pengembangan Destinasi wisata di Kabupaten Halmahera Barat serta peningkatan



MISI KETIGA : MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH DENGAN MENSINERGIKAN SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN,

Sasaran Ke 4

Sasaran Ke-4 :Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak

Tabel: III.21

No	Sasaran	indikator	Target
4	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata (persen)	17,91

Pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata dihitung menggunakan formula:

$$PNT_{Pr} = \left(\frac{PDRBP_{r_t} - PDRBP_{r_{t-1}}}{PDRBP_{r_{t-1}}} \right) \times 100\%$$

Dimana :

PNTPr = Pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata

PDRBPr = PDRB ADHK Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi & Makan Minum

t = Tahun yang ditinjau

Dalam capaian pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata (persen) maka Sasaran Strategis yang di pergunakan untuk mencapai formula tersebut adalah :

Tabel: III.22

No	Sasaran	indikator	Target
4	Peningkatan Angka Kunjungan	1.Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	200
		2.Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	9000
		3.Lama tinggal Wisatawan Mancanegara	2
		4.Lama tinggal Wisatawan Nusantara	3,5

Sasaran Strategis ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa sasaran ini merupakan variabel penting bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam menjadi tolak ukur kinerja Bupati, mengingat pentingnya peningkatan dan pengembangan Destinasi wisata di Kabupaten Halmahera Barat serta peningkatan



promosi Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat melalui event/Festival Pariwisata yang dilakukan secara terus menerus sehingga membutuhkan dukungan Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Halmahera Barat sebagai daya dorong pariwisata Kabupaten Halmahera Barat di kompetisi Nasional maupun Internasional. Adapun Spot Wisatawan yang ada di Halmahera Barat mencakup, Keindahan Pantai, Keindahan Gunung Gamkonora, Burung Bidadari yang langka, Pemandian Air Panas, Pelaksanaan Festival Teluk Jailolo dan Lainnya, ada pun bukti eviden dokumentasi terhadap capaian Bupati Halmahera Barat sebagaimana link pada google drev terlampir: <https://drive.google.com/drive/folders/1PpqJ5LqMY1gpg1cBMsTYTpKyq2Kfl1kI>

b) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Adapun target dan realisasi pada capaian realisasi sasaran 6 yang dapat diukur Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak, yang memprioritaskan dalam perjanjian kerja dalam sektor urusan kepariwisataan adalah sebagai tabel berikut:

Tabel: III.23

No	Sasaran	indikator	Target	Realisasi	Presentasi
1	Peningkatan Angka Kunjungan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	200	215	107,5%
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	9000	9.235	102,6%
		Lama tinggal Wisatawan Mancanegara	2	3	150%
		Lama tinggal Wisatawan Nusantara	3,5	4	114,3%

c) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun capaian target kinerja dalam tahun ini dengan tahun yang lalu adalah sebagai berikut:

Tabel: III.24

No	Sasaran	Tahun 2024	Realisasi 2024	TAHUN 2025	Realisasi 2025
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	5.500	487	200	214
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	85.000	76,071	9000	9.235
3	Lama tinggal Wisatawan Mancanegara	2	3	2	3
4	Lama tinggal Wisatawan Nusantara	3,5	4	3,5	4



- d) **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Adapun bentuk perbandingan capaian kinerja dengan dokumen setragis RPJMD Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel: III.25

No	Sasaran	Realisasi		Target RPJMD	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	487	214	483	1.112
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	76.071	9.235	11,443	15.162
3	Lama tinggal Wisatawan Mancanegara	3	3	3	3
4	Lama tinggal Wisatawan Nusantara	4	4	4	4

Sumber data : RPJMD Pemerintah Kab. Halmahera Barat 2021-2026

- g) **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Dari data yang tersedia dan dari hasil analisis 4 (empat) indikator pada 1 (Satu) sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 maka Capaian indikator kinerja termasuk dalam Skala Nilai Peringat Kinerja pada Interval Nilai Realisasi Kinerja $91 \leq 100$ dengan Kriteria Penilaian **Sangat Tinggi** dimana dari 4 Indikator Kinerja yang semuanya mencapai target indikator kinerja yang telah melampaui target yang ditetapkan,

Tabel: III.26

Kunjungan wisatawan tahun 2024

**JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024**

Tahun 2024						
No	Bulan	Tahun N				Jumlah
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Tujuan Wisata			
			Bisnis	Berlibur	Pribadi	
1.	Januari	4627	0	4627	0	4627
2.	Februari	2652	0	2652	0	2652
3.	Maret	3096	0	3096	0	3096
4.	April	5744	0	5744	0	5744
5.	Mei	5243	0	5243	0	5243
6.	Juni	5768	0	5768	0	5768
7.	Juli	7926	0	7926	0	7926
8.	Agustus	8108	0	8108	0	8108
9.	September	8342	0	8342	0	8342
10.	Oktober	8126	0	8126	0	8126
11.	November	7177	0	7177	0	7177
12.	Desember	9262	0	9262	0	9262
Jumlah		76.071	0	76.071	0	76.071

Sumber Data : Disparpora Kabupaten Halmahera Barat



Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2023 menurun dibanding tahun 2024 dan tidak mencapai target yang ditetapkan dari target indikator kinerja yang telah ditetapkan, sedangkan untuk Tahun **2025** pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mencapai kinerjanya yang lebih optimal dari jumlah kunjungan.

Indikator jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara pada tahun 2025 sangat tinggi dan bahkan melampaui target yang ditetapkan. Low season Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Justru meningkat dari tahun sebelumnya untuk Tahun 2025 mencapai 9.235 kunjungan yang artinya kunjungan wisatawan nusantara terbilang “Sangat Tinggi” karena mampu melampaui target yang ditetapkan di capaian sebesar **102,6%** Kunjungan wisatawan dalam Negeri;

No	Bulan	Tahun N								Jumlah
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Tujuan Wisata			Kebangasaan				
			Bisnis	Berlibur	Pribadi	Jerman	USA	Australia	dll	
1.	Januari	9	0	9	0	2	0	2	5	9
2.	Februari	21	0	21	0	11	2	4	4	21
3.	Maret	14	0	14	0	4	0	0	10	14
4.	April	18	0	18	0	2	2	4	10	18
5.	Mei	33	0	33	0	10	2	12	9	33
6.	Juni	51	0	51	0	15	2	21	13	51
7.	Juli	59	0	59	0	28	0	28	3	59
8.	Agustus	49	0	49	0	24	0	20	5	49
9.	September	42	0	42	0	16	0	18	8	42
10.	Oktober	50	0	50	0	20	2	20	8	50
11.	November	53	0	53	0	17	2	16	18	53
12.	Desember	88	0	88	0	36	0	32	20	88
Jumlah		487	0	487	0	185	12	177	113	487

Tabel: III.27

Sumber data: Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga

Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara tahun 2025 naik sebesar 150% atau 3 hari dari target 2 hari yang ditetapkan sehingga terbilang berhasil meningkat dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencapai 100% atau 2 hari dari target 2 hari yang ditetapkan. Sehingga peningkatan dari indikator lama tinggal wisatawan mancanegara tahun 2025 dibanding tahun 2024 naik beberapa persen dan tidak terlalu signifikan Peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan



mancanegara ini tidak terlepas dari kerja Bupati melalui Promosi Pariwisata dan Event-event yang diselenggarakan dalam rangka memperkenalkan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat di Mata Dunia

Rata-rata lama tinggal wisatawan Nusantara tahun 2025 meningkat dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 114,286% atau 4 hari dari target 3,5 hari yang ditetapkan dan ini artinya terjadi peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan Nusantara dibanding tahun 2024 yang hanya 100% atau hanya mencapai 3,5 hari dari target 3.5 hari ditetapkan. jika dilakukan perbandingan maka kenaikan persentase tahun 2024 dibanding 2023 sebesar 114,286% kenaikan. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh beberapa Event yang diselenggarakan Oleh Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat dalam rangka mempromosikan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat melalui kerja sama dengan berbagai pihak Nasional maupun Internasional.

Dari data yang tersedia dan dari hasil analisis 4 (empat) indikator mencapai sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2025 maka Capaian indikator kinerja termasuk dalam Skala Nilai Peringat Kinerja pada Interval Nilai Realisasi Kinerja $91 \leq 100$ dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi dimana dari 4 Indikator Kinerja yang tersedia mencapai target maksimum indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan.

Adapun **keberhasilan** adalah karena :

1. Keindahan Pantai & Gunung Gamkonora
 - a. Menjadi daya tarik utama karena keindahan alam yang khas dan relatif masih alami.
 - b. Potensi besar menarik wisatawan mancanegara yang mencari destinasi eksotis.
 - c. Mendukung peningkatan lama tinggal wisatawan karena variasi aktivitas (pantai, pendakian).
2. Burung Bidadari (langka)
 - a. Nilai jual tinggi sebagai ekowisata dan *birdwatching*.
 - b. Menjadi diferensiasi unik dibanding daerah lain di Maluku Utara.
 - c. Mendukung branding Halmahera Barat sebagai destinasi konservasi.
3. Pemandian Air Panas
 - a. Menambah variasi atraksi wisata, cocok untuk wisata keluarga dan kesehatan.
 - b. Bisa dikembangkan sebagai wisata minat khusus (*wellness tourism*).



4. Festival Teluk Jailolo

- a. Event budaya yang sudah dikenal luas, meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara.
- b. Membantu promosi daerah melalui media nasional/internasional.
- c. Efektif dalam meningkatkan angka kunjungan pada periode tertentu.

Selain dari kunci keberhasilan yang berhasil diterapkan maka adapun program/kegiatan penunjang keberhasilan yang dilakukan oleh Bupati dari pencapaiannya tidak terlepas dari program/kegiatan yang dilakukan dan diselenggarakan. Tercatat terdapat beberapa kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Halmahera Barat sebagai penunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Adapun Kegagalannya yakni dari faktor sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pengembangan pada potensi daya tarik wisata di berbagai daerah;
2. Kurangnya dukungan permodalan , peralatan, serta pemasaran terhadap sektor ekonomi kreatif;
3. Masih rendahnya kualitas SDM kepariwisataan;
4. Lemahnya koordinasi dan konsolidasi antar stakeholder Pariwisata;
5. Masih Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (media sosial, *influencer*, kerja sama swasta dll) dalam mempromosikan potensi wisata.
6. Aksesibilitas & Infrastruktur
 - a. Transportasi menuju Halmahera Barat masih terbatas, membuat wisatawan mancanegara sulit menjangkau.
 - b. Fasilitas pendukung (akomodasi, transportasi lokal) belum sebanding dengan potensi atraksi.
7. Promosi & Branding
 - a. Daya tarik unik (burung bidadari, Gunung Gamkonora) belum dipromosikan secara konsisten di pasar internasional.
 - b. Festival Teluk Jailolo kuat secara lokal, tetapi belum maksimal dalam menarik wisatawan mancanegara.
8. Manajemen & Konservasi
 - a. Risiko eksploitasi berlebihan terhadap spot alam (pantai, burung langka) jika tidak ada regulasi ketat.
 - b. Kurangnya program edukasi wisatawan tentang konservasi bisa mengurangi keberlanjutan.
9. Durasi Tinggal Wisatawan Nusantara



- a. Walau meningkat, rata-rata lama tinggal masih relatif pendek.
- b. Hal ini menunjukkan wisatawan cenderung datang hanya untuk event tertentu, bukan paket wisata lengkap.

Adapun program dan kegiatan dalam mencapai target Sasaran Peningkatan Jumlah Kunjungan dalam program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel: III.28

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp. 12.250.000.000

**Sasaran Ke 5****Sasaran Ke-5 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan**

Tabel: III.29

No	Sasaran	indikator	Target
5	Menurunnya Tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (persen)	7,77

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Indikator ini merupakan *indikator exact* yang menggambarkan keberhasilan dalam efektivitas penanggulangan kemiskinan di daerah. Tingkat kemiskinan dihitung menggunakan formula:

$$P = \frac{q}{n}$$

Dimana :

P = Persentase penduduk miskin

q = Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelaksanaan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program ini dirancang sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi kelompok rentan, memperkuat ketahanan sosial, serta memastikan setiap warga memperoleh hak dasar atas kesejahteraan.

Fokus utama program meliputi:

- Perlindungan Sosial bagi masyarakat miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar melalui bantuan langsung maupun layanan sosial terpadu.
- Jaminan Sosial yang mendukung akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan tenaga kerja, sehingga tercipta rasa aman dan kepastian hidup.
- Pemberdayaan Sosial melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas ekonomi keluarga, agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan tetapi juga mampu mandiri.
- Penanggulangan Bencana Sosial dengan memperkuat kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap bencana alam maupun konflik sosial, sehingga dampak terhadap masyarakat dapat diminimalisir.



Hal ini bertujuan agar Menurunkan angka kemiskinan dan kerentanan sosial di Halmahera Barat, Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang berkualitas, Mewujudkan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan memiliki ketahanan sosial, Menjamin keberlanjutan pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Adapun target dan realisasi pada capaian realisasi sasaran 7 Menurunnya Tingkat kemiskinan adalah sebagai tabel berikut:

Tabel: III.30

No	Sasaran	indikator	Target	Realisasi
5	Menurunnya Tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (persen)	7,77	9,69

Dalam pencapaian indikator tingkat kemiskinan di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengalami penurunan yang signifikan yang di targetkan penurunannya **7,77** menjadi meningkat diangka **9,69** ditahun 2025.

Dari angkat Tingkat Kemiskinan bisa dilihat dari presentasi hasil identifikasi terhadap data pada Badan Statistik Maluku Utara sebagaimana hasil nya berikut

:

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)	
	2025	
Halmahera Barat		9,69
Halmahera Tengah		5,61
Kepulauan Sula		8,05
Halmahera Selatan		11,78
Halmahera Utara		8,84
Halmahera Timur		11,05
Pulau Morotai		3,29
Pulau Taliabu		3,71
Ternate		8,51
Tidore Kepulauan		6,73
Maluku Utara		77,27

Sumber data : BPS Maluku Utara



Artinya, capaian penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Halmahera Barat mencapai **80,1%** dari target. Dimana dalam Perjanjian Bupati yang di Targetkan Adalah 7,77 dan ternyata setelah diamulasi data dari BPS Maluku Utara menjadi 9,69 yang Artinya bahwa Tingkat Penurunan Angka Kemiskinan berhasil dilaksanakan melalui Program Bupati Halmahera Barat.

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun capaian target kinerja dalam tahun ini dengan tahun yang lalu adalah sebagai berikut:

Tabel: III.31

No	Sasaran						Indikator	Target	Capaian	Realisasi
5	Menurunnya Tingkat kemiskinan						Tingkat Kemiskina n (persen)	9,77	9,69	80,1%
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	
	2023			2024			2025			
	8,29	8,74	5%	8,29	8,74	5%	7,77	9,69		80,1%

Adapun tabel pencapaian angka kemiskinan di Halmahera barat di beberapa tahun terakhir bisa dilihat dari data BPS Halmahera Barat Sebagai Berikut:

Angka kemiskinan data BPS Halmahera Barat

Tabel: III.32

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)	
	2023	2024
Halmahera Barat	8,74	8,75
Halmahera Tengah	11,44	10,71
Kepulauan Sula	8,17	7,96
Halmahera Selatan	5,68	5,63
Halmahera Utara	4,62	4,71
Halmahera Timur	12,47	11,91
Pulau Morotai	5,38	5,11
Pulau Taliabu	7,31	7,13
Ternate	3,39	3,14
Tidore Kepulauan	6,35	6,56
Maluku Utara	6,46	6,32

Sumber data : BPS. Kab. Halmahera Barat Tahun 204 <https://malut.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjk1IzI=/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota--persen-.html>



c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Adapun bentuk perbandingan capaian kinerja dengan dokumen setragis RPJMD Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel: III.33

No	Sasaran	Indikator	Realisasi
5	Menurunnya Tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (persen)	80,1%
TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN DALAM DOKUMEN RPJMD			
2023	2024	2025	
8,74	8,75	7,77	
REALISASI KINERJA	REALISASI KINERJA		
2023	2024	2025	
0%	5%	80,1%	

Sumber data : RPJMD Pemerintah Kab. Halmahera Barat 2021-2026

d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Adapun **Faktor Kegagalan** dalam menuntaskan Kemiskinan di Halmahera Barat adalah peningkatan kemiskinan itu terjadi dikarenakan ada kenaikan angka garis kemiskinan dari tahun 2023 ke 2024 yang meningkat 5 persen secara signifikan, problema tersebut terjadi karena sebagian masyarakat yang dikategori tidak miskin (hampir miskin) pada tahun 2023 setelah tahun 2024 menjadi miskin. Faktor penurunan kemiskinan adalah merupakan suatu dampak dari letusan gunung berapi di Kecamatan Ibu sehingga dana Alokasi Umum untuk diberikan kepada bantuan sosial tidak terealisasi secara optimal dalam rangka penanganan kemiskinan, program yang seyogyanya diprioritaskan seperti program kemiskinan ekstrim tidak dianggarkan namun anggaran yang tersalurkan berupa program bantuan sosial dan lain sejenisnya. Bantuan-bantuan Sosial untuk penanganan pencegahan Kemiskinan Di Halmahera Barat lebih terpusat pada bantuan Bencana sehingga anggaran tidak bisa terealisasi pada satu arah dan menjadi Faktor penghambat bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Ditahun **2025** Angka Kemiskinan Menurun dengan terlaksananya program Bupati Halmahera Barat.

Namun diukur dari sudut angka statistik BPS kabupaten Halmahera Barat Seyogyanya dibandingkan dengan Kabupaten Lainnya di Wilayah Provinsi Maluku



utara sudah termasuk angka kemiskinan yang terkecil Pada tahun 2025, persentase capaian peningkatan penurunan angka kemiskinan penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat sebesar 80,1%. Angka ini merupakan salah satu yang terendah di Maluku Utara.

Kabupaten Halmahera Barat sebagai salah satu daerah di Provinsi Maluku Utara yang merupakan Provinsi Kepulauan juga terdata angka stunting dan kemiskinan ekstrim yang perlu dilakukan penanganan dengan kebijakan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada sektor kesehatan akan tetapi juga terjadi disektor perekonomian. Sebagai upaya penanganan nasional dan daerah yang terdampak oleh stunting dan kemiskinan ekstrim, berbagai kebijakan mulai dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Salah satunya melalui kebijakan prioritas Program dan Kegiatan yang diarahkan pada pemulihan perekonomian dan pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam rangka pemulihan dampak ini, terutama bagi daerah-daerah dengan rasio kemandirian yang rendah. Akibat dari upaya penanganan ini, pada pelaksanaan anggaran pemerintah daerah terjadi perubahan asumsi dan kondisi *eksisting* yang mempengaruhi perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Angka kemiskinan yang begitu pesat bukan saja terjadi di Halmahera Barat bahkan dunia, hal tersebut perlu penanganan yang cukup serius oleh pemerintah pusat dengan dialokasi dana yang cukup memadai untuk bisa memprioritaskan program dan kegiatan yang sifatnya bisa membantu penurunan angka kemiskinan baik berupa pemberian lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, dengan kontribusi alat pertanian dan perikanan sehingga bisa terciptanya penurunan terhadap angka kemiskinan yang tidak di harapkan oleh bangsa ini.

Capaian terkait penurunan angka kemiskinan menurun dan tidak sesuai target dalam perjanjian Kinerja di Tahun 2025 dikarenakan program ekstrim penanganan kemiskinan di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun Faktor **Keberhasilan** Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan 3 strategi utama dalam rangka mengantisipasi Anka Kemiskinan yaitu:

- 1) Penurunan beban pengeluaran;
- 2) Peningkatan Pendapatan dan;



- 3) Pengurangan kantong-kantong kemiskinan yang berjalan secara konvergen dan terintegrasi.
- 4) Membangun fasilitas umum terutama Pasar Rakyat di Kecamatan Jailolo dan jalan akses rute lintas Kaupaten dari Kecamatan Jailolo menuju Kecamatan Loloda serta lintas Kabupaten Halmahera Barat ke menuju Halmahera Utara.
- 5) Bantuan sosial (BLT, PKH, BPNT) disalurkan kepada kelompok rentan: masyarakat miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar.
- 6) Data penerima manfaat yang semakin baik melalui integrasi dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
- 7) Kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam pendanaan serta pelaksanaan program.
- 8) Dukungan lembaga non-pemerintah dan komunitas lokal memperkuat efektivitas.
- 9) Program jaminan kesehatan dan pendidikan membantu menekan beban masyarakat miskin.
- 10) Perlindungan tenaga kerja informal mulai diperluas
- 11) Penanganan darurat bencana alam dan konflik sosial mengurangi dampak langsung terhadap kelompok rentan.
- 12) Adanya posko dan mekanisme distribusi bantuan yang lebih terstruktur.

Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata untuk melindungi kelompok-kelompok rentan agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan mendapatkan akses kebutuhan dasar yang berimplikasi langsung terhadap Masyarakat Halmahera Barat,

Adapun Faktor faktor-faktor yang mempengaruhi **kegagalan** yang dinilai mampu dalam mengurangi angka kemiskinan yakni:

- 1) Program bantuan sosial dal penyediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat, dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dapat membantu mengurangi kemiskinan;
- 2) Kolaborasi Kerja sama antara pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan pihak eksternal yang dapat meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan yang terjadi;
- 3) Kebijakan yang mendukung laju pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menjaga stabilitas harga pasar dapat membantu menurunkan angka kemiskinan.
- 4) Pembangunan infrastruktur dapat membantu mengurangi kemiskinan karena dengan fasilitas tersebut masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang ada;
- 5) Intervensi pendidikan dan kesehatan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan;



- 6) Komitmen pimpinan daerah dalam penanggulangan kemiskinan dapat meningkatkan keberhasilan pengurangan Angka Kemiskinan;
- 7) Stabilitas harga bahan pokok dan sembakau di pasaran dapat membantu menjaga konsumsi dasar masyarakat.
- 8) Masih terdapat kasus salah sasaran (inclusion error/exclusion error).
- 9) Data belum sepenuhnya mutakhir sehingga ada masyarakat miskin yang tidak terdaftar.
- 10) Dana perlindungan sosial sering terbatas dibandingkan kebutuhan riil.
- 11) Ketergantungan pada APBN/APBD membuat program tidak selalu berkelanjutan.
- 12) Program masih dominan bersifat bantuan langsung, belum cukup mendorong kemandirian ekonomi.
- 13) Daerah terpencil dan kepulauan sulit dijangkau, sehingga distribusi bantuan tidak merata.
- 14) Infrastruktur sosial (transportasi, komunikasi) masih menjadi hambatan.
- 15) Tenaga pendamping sosial belum mencukupi untuk menjangkau seluruh penerima manfaat.
- 16) Kapasitas monitoring dan evaluasi masih lemah.

Adapun program dan kegiatan dalam mencapai target penurunan kemiskinan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tabel berikut :

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL		
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	RP. 2,864,884, 600

**Sasaran Ke 6****Sasaran Ke-6 : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel**

Tabel: III.34

No	Sasaran	indikator	Target
6	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	WTP

Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan indikator terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dikelompokkan menjadi empat :

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
3. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*) Tidak memberikan pendapat (TMP) adalah opini yang diberikan ketika auditor tidak meyakini apakah laporan keuangan yang disajikan wajar atau tidak.
4. Tidak Wajar Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Adapun target dan realisasi pada capaian realisasi sasaran 7 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel adalah sebagai tabel berikut:

Tabel: III.35

No	Sasaran	indikator	Target	Realisasi
6	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP

Dalam pencapaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah penyelenggaraan Pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan bersifat



akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi hal tersebut sebagaimana hasil laporan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara di Ternate, Pemerintah Halmahera Barat yang dipimpin oleh Bapak James Uang selaku Bupati Halmahera Barat suda mendapatkan WTP Ke-7 kalinya sebagaimana yang diberitakan pada maluttimes. (<https://maluttimes.com/2024/05/29/berturut-turut-pemda-halmahera-barat-raih-opini-wtp-yang-ketujuh-kali/>) penyerahan tersebut diberikan langsung oleh BPK RI Perwakilan Maluku Utara kepada Wakil Bupati Halmahera Barat Bapak Jufri Muhammad.

Gambar :III. 7



Penyerahan hasil WTP di BPK.R.I Perwakilan MALUT diterate

c) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun capaian target kinerja dalam tahun ini dengan tahun yang lalu adalah sebagai berikut:

Tabel: III.36

Tabel 11.30										
No	Sasaran						Indikator	Target	Capaian	Realisasi
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel						Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian		Realisasi
	2023			2024			2025			
	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP		100%



- e) **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Adapun bentuk perbandingan capaian kinerja dengan dokumen setragis RPJMD Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel: III.37

No	Sasaran	Indikator	Realisasi
7	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN DALAM DOKUMEN RPJMD			
2022	2023	2024	
WTP	WTP	WTP	
REALISASI KINERJA			
2022	2023	2024	
100%	100%	100%	

Sumber data : RPJMD Pemerintah Kab. Halmahera Barat 2021-2026

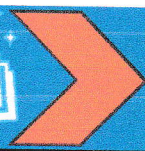
- f) **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Adapun capaian atas OPINI BPK terhadap LKPD di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat merupakan laporan keuangan dan tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel, efektif dan efisiensi, dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mendapatkan predikat WTP dalam artian manajemen keuangannya sangat baik, dalam indikator tersebut atas capaiannya dianggap Bupati Halmahera Barat mampu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap kepercayaan keuangan yang ditransfer dari pusat baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana lainnya.

Capaian opini WTP telah melebihi target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2021-2026 dengan capaian di Tahun 2025 adalah **WTP**. “Capaian ini merupakan hasil usaha pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Adapun penyebab Keberhasilan dalam mencapai WTP adalah ;

- 1) APIP telah memiliki rencana pengawasan berbasis risiko.



- 2) Komitmen Pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan budaya kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- 3) Adanya dukungan OPD yang proaktif dalam menindaklanjuti temuan Inspektorat Daerah dan pemeriksa lainnya.
- 4) Koordinasi yang berjalan baik antara Inspektorat Daerah dan OPD mitra dan adanya timbal balik serta komunikasi yang berjalan dengan baik.
- 5) Koordinasi yang intens antara Pegawai di Inspektorat Daerah.
- 6) Adanya Klinik Konsultasi di Inspektorat Daerah memudahkan OPD untuk berkonsultasi untuk meminimalisir kesalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga dapat meminimalisir temuan dan rekomendasi.
- 7) APIP berkomitmen dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pengendalian Intern Pemerintah dan penerapan Zona Integritas.

Adapun Penyebab **Kegagalan** adalah Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambat ketercapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, antara lain :

- 1) Belum semua APIP mendapatkan pelatihan peningkatan dan pengembangan kompetensi.
- 2) Masih ditemui adanya rekomendasi yang lambat ditindaklanjuti/proses tindak lanjut yang lama oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga Inspektorat Daerah perlu meningkatkan koordinasi oleh masing- masing bidang dengan OPD mitra kerjanya. Hal ini perlu dilakukan mengingat jangka waktu penyelesaian hasil pengawasan adalah 60 hari semenjak diterimanya laporan hasil evaluasi oleh OPD terkait, sehingga masih ada waktu bagi OPD untuk menyelesaikan tindak lanjut untuk waktu yang cukup. Sehingga seharusnya tidak ada lagi keterlambatan tindaklanjut rekomendasi.
- 3) Masih banyak OPD yang belum memahami pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan penilaian mandiri diketahui bahwa masih banyak OPD yang mengesampingkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembenahan tata kelola pemerintahan.
- 4) Terdapat beberapa hasil temuan pemeriksaan BPK yang sudah ditindaklanjuti, namun belum dianggap cukup oleh BPK walaupun sudah menindaklanjuti



temuan BPK tersebut, karena penentuan suatu temuan selesai atau masih dalam proses adalah BPK Pusat. Sehingga hal ini dianggap menjadi tugas dan tanggungan bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk menyelesaikan.

- 5) Masih minimnya kompetensi SDM yang mampu analisa dan pengelolaan data dan administrasi hasil pengawasan di setiap bidang, sehingga beberapa arsip tidak terdokumentasikan dengan baik.
- 6) Kurangnya kompetensi SDM di bidang pengawasan teknologi informasi. Hal ini diperlukan dalam rangka melakukan digitalisasi dokumen-dokumen sehingga meminimalisir kerusakan atau kehilangan dokumen fisik

Adapun program dan kegiatan dalam mencapai target WTP adalah seluruh program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Program Pendukung Operasional Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tabel berikut :

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	BELANJA DAERAH	Rp. 1.178.265.558.952.
2	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH/PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	Rp. Rp 3.817.368,40



Sasaran Ke-7 : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel: III.34

No	Sasaran	Indikator	Target
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sakip	B

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) didefinisikan sebagai tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengukuran capaian kinerja, efektivitas sistem manajemen pelayanan publik dan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien yang meliputi Rencana Strategis, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Capaian kinerja, Evaluasi kinerja. Nilai SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi tujuh kategori: D (0-30) C (30-50) CC (50-60) B (60-70) BB (70-80) A (80-90) AA (90-100)

a) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun capaian target kinerja dalam tahun ini dengan tahun yang lalu adalah sebagai berikut:

Tabel: III.36

No	Sasaran						Indikator	Target	Capaian	Realisasi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah						Nilai Sakip	B	CC	90%
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian		Realisasi
	2023			2024			2025			
	CC	C	90%	CC	CC	100%	B	CC		905

b) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Adapun bentuk perbandingan capaian kinerja dengan dokumen setragis RPJMD Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel: III.37

No	Sasaran	Indikator	Realisasi
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	NILAI SAKIP	CC
TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN DALAM DOKUMEN RPJMD			
2023		2024	2025
B		BB	A
REALISASI KINERJA			
2023		2024	2025
90%		80%	90%

Sumber data : RPJMD Pemerintah Kab. Halmahera Barat 2021-2026



c) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diberbagai daerah berdampak pada penghematan anggaran, pelayanan publik yang semakin baik, hingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Halmahera Barat adalah salah satu daerah yang meraih predikat C dalam implementasi SAKIP, mengalami Kenaikan Sebesar CC ditahun 2019 namun ditahun 2020/2023 hingga Nilai SAKIP di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sangat minim Capaiannya dengan Predikat C.

Perlu diketahui, dengan adanya penerapan SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Dalam penerapan SAKIP, anggaran hanya digunakan untuk membiayai program atau kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mendapatkan Predikat CC ditahun tahun sebelumnya namun terus berupaya untuk meningkatkan perolehan nilai dengan mengintegrasikan perencanaan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan. “Diharapkan kedepan Halmahera Barat bisa meraih predikat CC dapat berubah menjadi B di tahun selanjutnya dan kabupaten kita dorong agar bisa mencapai predikat tersebut.

Diharapkan ke depannya SAKIP dapat menjadi instrumen untuk tiap kabupaten dan kota untuk mencapai tujuan pemerintahan dalam menyejahterakan masyarakat. Instrumen yang tidak terpisahkan dari masyarakat, karena dengan SAKIP akan menjadikan APBD lebih efektif, efisien, fokus, tepat sasaran, dan jelas berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Setelah APBD dijalankan secara efisien, tentunya yang merasakan manfaatnya adalah masyarakat

Adapun Penyebab Keberhasilan peningkatan terhadap SAKIP Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 adalah:

- 1) Pemanfaatan Anggaran Daerah yang lebih baik dan efektif dipergunakan sehingga anggaran yang tidak perlu diperuntukkan dan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana mestinya, dilakukan perubahan anggaran melalui Pergeseran APBD dan juga Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);



- 2) Bupati dan Sekretaris Daerah berperan Penting dalam Memonitoring dan Evaluasi Kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah terhadap Penilaian SAKIP;
- 3) Adanya Bimbingan Teknis terhadap Pengembangan Sumber Daya Aparatur Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di Kota Ambon Propinsi Maluku Utara ditahun 2024 yang kemarin sehingga Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bisa mencapai Nilai CC dan lebih baik dari nilai sebelumnya di Tahun sebelumnya
- 4) Adanya jalinan hubungan kerja sama yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah sehingga Data Pendukung mudah didapatkan dalam rangka penyusunan dokumen SAKIP;

Adapun Penyebab Kegagalan terhadap peningkatan SAKIP Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 adalah:

1. Laporan SAKIP tidak sesuai dengan RPJMD dan Visi Misi Bupati, sehingga output pengeluaran belanja Perangkat Daerah tidak sesuai dengan pencernaan dan perjanjian kinerja;
2. Kurangnya Pemahaman Sumber Daya Aparatur dalam memahami penyusunan Laporan Akuntabilitas untuk Organisasi Perangkat Daerah;
3. Kabupaten Halmahera Barat memiliki darah kepulauan dan daerah terpencil dimana di Kabupaten tersebut belum stabil koneksi jaringan seluler yang bisa berdampak pada komunikasi dan pelaporan SAKIP terlambat;

Adapun program dan kegiatan dalam mencapai target SAKIP adalah seluruh program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penataan Organisasi dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
3	PENATAAN ORGANISASI	RP. 9.000.000

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan laporan kinerja ini setidaknya memiliki 2 (dua) fungsi yaitu bagi internal organisasi sebagai media untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik dan bagi masyarakat diharapkan sebagai sarana untuk menilai kualitas penyelenggara pemerintahan sebagai pihak penerima amanah.

Dokumen ini merupakan gambaran pencapaian target-target sasaran dari setiap Agenda, Kebijakan dan Program Pembangunan seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021–2026 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2025. Evaluasi kinerja ini perlu dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya.

Namun pelaksanaan terhadap Dokumen tersebut perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan Regulasi Daerah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023, yang kemudian direpresentasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan sebagai Target dan sasaran yang akan dicapai oleh Bupati Halmahera Barat sebagai target dan sasaran tercapaian tujuan dari visi dan misi Bupati Halmahera Barat di tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, nampak bahwa masih terdapat indikator sasaran yang tidak dapat diukur, hal ini disebabkan karena indikator-indikator tersebut bersifat kualitatif. Namun demikian, capaian indikator utama yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Halmahera Barat nampak telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan pada pencapaian tahun berjalan.

Pengukuran kinerja serta analisis capaian kinerja sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya memuat pencapaian kinerja



tahun pelaporan (2025) dan juga membandingkan capaian kinerja dari tahun sebelumnya serta beberapa tahun kebelakang, yang muaranya mengarah pada target akhir pencapaian dari Perjanjian Kinerja yang diukur capaiannya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara umum dapat dikatakan kinerja dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2025 dikategorikan **“Sangat Baik”**, karena dari 11 sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator target realisasi dan capaian Kabupaten Halmahera Barat dan Perjanjian Kerja (PK), mendapatkan predikat sasaran berpredikat **“Sangat BAIK”** dan sementara pada 1 Sasaran dalam rangka upaya penurunan angka kemiskinan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Walaupun demikian, dalam melaksanakan program/kegiatan dalam upaya pencapaian indikator pembangunan tersebut, masih terdapat permasalahan yang sangat signifikan yakni masih adanya program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak sesuai dengan program yang telah disepakati dalam RPJMD, hal ini disebabkan karena Rencana Pembangunan Strategis (RENSTRA) SKPD yang menjadi acuan pelaksanaan program/kegiatan pada setiap SKPD belum seutuhnya bersinergi dengan RPJMD tahun 2021 - 2026. Dengan kondisi yang demikian maka apa yang dilakukan oleh sebahagian Organisasi Perangkat Daerah tidak terfokus pada upaya pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perbaikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Halmahera Barat terus dilakukan demi pencapaian hasil dari Visi dan Misi Bupati.



PEMERINTAHAN KAB. HALMAHERA BARAT



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1,197,381,827,740.00	1,051,534,481,017.93	87.81	1,071,050,446,032.02
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64,839,032,716.00	40,584,248,272.93	62.59	31,448,657,342.41
4.1.01	Pajak Daerah	12,146,930,757.00	11,521,761,883.00	94.85	5,761,124,015.00
4.1.01.06	Pajak Hotel	140,000,000.00	124,537,240.00	88.95	141,116,300.00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	140,000,000.00	124,537,240.00	88.95	141,116,300.00
4.1.01.07	Pajak Restoran	578,580,000.00	641,533,511.00	110.88	432,740,925.00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	578,580,000.00	641,533,511.00	110.88	432,740,925.00
4.1.01.09	Pajak Reklame	725,300,000.00	623,786,850.00	86.00	542,993,340.00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	725,300,000.00	623,786,850.00	86.00	539,631,340.00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	0.00	0.00	0.00	3,362,000.00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	4,500,000,000.00	4,347,293,693.00	96.60	3,805,475,182.00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4,500,000,000.00	4,347,293,693.00	96.60	3,805,475,182.00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500,000,000.00	329,818,202.00	65.96	626,246,455.00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500,000,000.00	329,818,202.00	65.96	626,246,455.00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1,700,000,000.00	193,664,787.00	11.39	134,125,583.00
4.1.01.15.01	PBBP2	1,700,000,000.00	193,664,787.00	11.39	134,125,583.00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	170,600,000.00	98,049,350.00	57.47	78,426,230.00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	170,600,000.00	98,049,350.00	57.47	0.00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	0.00	0.00	0.00	78,426,230.00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1,832,450,757.00	1,937,378,887.00	105.72	0.00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	1,832,450,757.00	1,937,378,887.00	105.72	0.00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2,000,000,000.00	3,225,699,363.00	161.28	0.00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	2,000,000,000.00	3,225,699,363.00	161.28	0.00
4.1.02	Retribusi Daerah	2,639,152,000.00	2,637,714,592.56	99.94	1,932,313,339.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	715,401,000.00	404,403,000.00	56.52	415,761,000.00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	250,000,000.00	93,730,000.00	37.49	41,770,000.00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	165,000,000.00	199,460,000.00	120.88	149,805,000.00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	196,980,000.00	59,886,000.00	30.40	38,214,000.00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	103,421,000.00	51,327,000.00	49.62	185,972,000.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1,750,399,000.00	1,696,870,820.56	96.94	1,386,792,839.00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0.00	0.00	0.00	8,550,000.00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	158,570,000.00	146,060,000.00	92.11	0.00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	0.00	0.00	0.00	19,204,000.00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	850,000,000.00	1,091,326,661.00	128.39	890,348,839.00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	91,829,000.00	38,971,000.00	42.43	54,015,000.00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	650,000,000.00	420,513,159.56	64.69	414,675,000.00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	173,352,000.00	536,440,772.00	309.45	129,759,500.00
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan	0.00	1,800,000.00	0.00	3,950,000.00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	173,352,000.00	534,640,772.00	308.41	121,809,500.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,369,384,000.00	1,602,830,704.00	117.04	1,305,284,687.00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Divisi)	1,369,384,000.00	1,602,830,704.00	117.04	1,305,284,687.00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Divisi)	1,369,384,000.00	1,602,830,704.00	117.04	1,305,284,687.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48,683,565,959.00	24,821,941,093.37	50.98	22,449,935,301.41
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0.00	2,200,000.00	0.00	32,660,000.00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	0.00	2,200,000.00	0.00	32,660,000.00
4.1.04.05	Jasa Giro	613,942,000.00	315,820,235.72	51.44	308,795,458.34
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	613,942,000.00	241,499,018.85	39.33	219,046,078.20
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0.00	51,581,682.52	0.00	65,532,732.39
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0.00	0.00	0.00	5,910,981.68
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0.00	(1,212,469.76)	0.00	(792,012.09)
4.1.04.05.06	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0.00	8,361,156.11	0.00	(425,806.84)
4.1.04.05.07	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0.00	15,590,848.00	0.00	19,523,485.00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	130,447,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	130,447,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	16,627,249,243.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil	16,627,249,243.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0.00	0.00	0.00	46,720.00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0.00	0.00	0.00	46,720.00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	7,228,847,210.00	1,508,566,359.13	20.86	899,357,060.19
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	7,228,847,210.00	1,508,566,359.13	20.86	899,357,060.19
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	20,000,000.00	1,588,099.00	7.94	0.00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	20,000,000.00	1,588,099.00	7.94	0.00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	4,300,246,506.00	2,673,946,138.00	62.18	2,430,563,906.65
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Upah	0.00	0.00	0.00	98,318,549.00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	4,300,246,506.00	2,360,295,264.00	54.88	970,894,280.90

4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belan	0.00	158,866,320.00	0.00	0.00
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belan	0.00	0.00	0.00	64,747,000.00
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belan	0.00	48,810,000.00	0.00	15,550,000.00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belan	0.00	0.00	0.00	31,001,631.00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belan	0.00	40,980,000.00	0.00	22,053,400.00
4.1.04.15.30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belan	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
4.1.04.15.31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belan	0.00	64,994,554.00	0.00	1,169,485,755.75
4.1.04.15.86	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belan	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4.1.04.15.99	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belan	0.00	0.00	0.00	16,513,290.00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	19,189,770,000.00	20,318,820,261.52	105.88	18,777,012,156.23
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	19,189,770,000.00	20,312,997,072.20	105.85	18,777,012,156.23
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0.00	5,823,189.32	0.00	0.00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	573,064,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	573,064,000.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	64,839,032,716.00	40,584,248,272.93	62.59	31,448,657,342.41
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,102,780,087,024.00	1,003,564,456,189.00	91.00	1,031,497,215,998.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,050,631,644,000.00	963,268,605,395.00	91.68	1,008,995,478,162.00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	215,177,139,000.00	166,949,950,235.00	77.58	165,988,097,124.00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	18,425,544,000.00	13,634,205,500.00	73.99	5,987,356,135.00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	196,751,595,000.00	153,315,744,735.00	77.92	160,000,740,989.00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	514,831,002,000.00	511,525,326,828.00	99.35	501,798,376,172.00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	416,825,166,000.00	416,796,162,386.00	99.99	385,821,339,637.00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	98,005,836,000.00	94,729,164,442.00	96.65	115,977,036,535.00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	185,070,673,000.00	180,148,778,524.00	97.34	203,997,031,866.00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	63,788,761,000.00	62,486,105,767.00	97.95	103,979,616,369.00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	121,281,912,000.00	117,662,672,757.00	97.01	100,017,415,497.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	915,078,814,000.00	858,624,055,587.00	93.83	871,783,505,162.00
4.2.01.05	Dana Desa	135,552,830,000.00	104,644,549,808.00	77.19	137,211,973,000.00
4.2.01.05.01	Dana Desa	135,552,830,000.00	104,644,549,808.00	77.19	137,211,973,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LA	135,552,830,000.00	104,644,549,808.00	77.19	137,211,973,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52,148,443,024.00	40,295,850,794.00	77.27	22,501,737,836.00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	52,148,443,024.00	40,295,850,794.00	77.27	22,501,737,836.00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	52,148,443,024.00	40,295,850,794.00	77.27	22,501,737,836.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	52,148,443,024.00	40,295,850,794.00	77.27	22,501,737,836.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1,102,780,087,024.00	1,003,564,456,189.00	91.00	1,031,497,215,998.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29,762,708,000.00	7,385,776,556.00	24.81	8,104,572,691.61
4.3.01	Pendapatan Hibah	24,814,300,000.00	0.00	0.00	0.00
4.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	24,814,300,000.00	0.00	0.00	0.00
4.3.01.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	24,814,300,000.00	0.00	0.00	0.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pe	4,948,408,000.00	7,385,776,556.00	149.25	8,104,572,691.61
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	4,948,408,000.00	7,385,776,556.00	149.25	8,104,572,691.61
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4,948,408,000.00	7,385,776,556.00	149.25	8,104,572,691.61
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29,762,708,000.00	7,385,776,556.00	24.81	8,104,572,691.61
	JUMLAH PENDAPATAN	1,197,381,827,740.00	1,051,534,481,017.93	87.81	1,071,050,446,032.02
5	BELANJA DAERAH	1,178,265,558,952.00	1,015,655,464,689.08	86.19	1,041,202,784,835.22
5.1	BELANJA OPERASI	794,230,764,490.00	717,503,337,644.06	90.33	698,072,891,212.22
5.1.01	Belanja Pegawai	439,531,012,669.00	400,827,384,815.00	91.19	343,963,092,580.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	318,162,273,229.00	271,923,262,261.00	85.46	251,744,668,311.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	231,845,430,342.00	208,289,051,484.00	89.83	191,667,988,696.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	26,365,502,860.00	19,724,046,662.00	74.81	18,434,677,435.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6,090,522,450.00	4,718,484,786.00	77.47	5,008,394,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16,697,545,850.00	13,903,400,000.00	83.26	12,597,463,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4,143,024,750.00	2,405,435,000.00	58.05	2,436,055,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16,535,624,780.00	11,901,864,900.00	71.97	11,204,387,880.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	312,100,480.00	246,509,394.00	78.98	122,025,934.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15,967,615.00	2,788,569.00	17.46	2,560,849.00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12,567,605,421.00	9,019,318,018.00	71.76	8,638,062,993.00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	598,323,463.00	427,148,514.00	71.39	392,474,433.00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1,792,357,228.00	1,285,214,934.00	71.70	1,189,697,030.00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	1,198,267,990.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus	0.00	0.00	0.00	50,881,061.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	108,175,183,243.00	112,058,568,391.00	103.58	72,318,498,318.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	29,263,385,243.00	22,911,884,191.00	78.29	23,342,375,218.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1,755,740,000.00	1,685,804,000.00	96.01	1,882,000,000.00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6,312,000,000.00	6,303,000,000.00	99.85	8,612,500,000.00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif L	70,844,058,000.00	81,157,880,200.00	114.55	38,481,623,100.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif L	0.00	0.00	0.00	2,477,946,104.00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0.00	0.00	0.00	2,472,946,104.00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12,484,313,240.00	12,439,447,780.00	99.64	12,374,017,242.00

5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561,540,000.00	561,540,000.00	100.00	561,435,000.00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84,560,000.00	84,560,000.00	100.00	70,287,000.00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	91,000,000.00	91,000,000.00	100.00	75,171,960.00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48,132,000.00	48,132,000.00	100.00	48,121,500.00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814,233,000.00	814,233,000.00	100.00	813,776,250.00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	239,971,122.00	239,971,122.00	100.00	76,845,425.00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	84,216,000.00	84,216,000.00	100.00	0.00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1,890,000,000.00	1,890,000,000.00	100.00	1,890,000,000.00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472,500,000.00	472,500,000.00	100.00	472,500,000.00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	207,122,104.00	207,122,102.00	99.99	207,768,643.00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3,616,948,023.00	3,616,562,967.00	99.98	3,577,351,464.00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4,319,090,991.00	4,319,090,991.00	100.00	4,340,100,000.00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	55,000,000.00	10,519,598.00	19.12	240,660,000.00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	180,538,957.00	172,452,683.00	95.52	146,927,305.00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55,001,885.00	54,632,332.00	99.32	46,800,000.00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7,913,451.00	7,644,000.00	96.59	6,552,000.00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	101,744,370.00	98,303,583.00	96.61	84,240,000.00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8,396,954.00	8,111,040.00	96.59	6,952,320.00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	291,203.00	291,203.00	100.00	229,305.00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1,159.00	1,040.00	89.73	880.00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6,647,299.00	2,931,468.00	44.10	1,778,400.00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135,659.00	131,040.00	96.59	93,600.00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	406,977.00	406,977.00	100.00	280,800.00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	488,704,000.00	484,704,000.00	99.18	452,688,000.00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	88,704,000.00	88,704,000.00	100.00	86,688,000.00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400,000,000.00	396,000,000.00	99.00	366,000,000.00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	0.00	0.00	0.00	4,330,327,300.00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	0.00	0.00	0.00	4,330,327,300.00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	0.00	3,724,949,700.00	0.00	99,520,000.00
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	0.00	3,672,579,700.00	0.00	0.00
5.1.01.89.02	Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD	0.00	52,370,000.00	0.00	99,520,000.00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	40,000,000.00	24,000,000.00	60.00	18,500,000.00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	40,000,000.00	24,000,000.00	60.00	18,500,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323,223,600,606.00	287,502,163,484.06	88.94	279,829,108,446.22
5.1.02.01	Belanja Barang	93,433,082,265.00	77,820,898,359.16	83.29	76,610,665,367.60
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	92,516,817,265.00	77,006,456,255.16	83.23	74,686,298,767.60
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	916,265,000.00	814,442,104.00	88.88	1,924,366,600.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	81,820,676,248.00	70,998,900,727.40	86.77	56,660,585,601.20
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	64,068,674,148.00	57,737,638,029.40	90.11	39,773,405,997.20
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1,265,227,200.00	498,088,800.00	39.36	265,291,200.00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	300,000,000.00	0.00	0.00	280,000,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3,246,358,500.00	3,166,354,500.00	97.53	3,444,590,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2,710,390,000.00	2,395,530,000.00	88.38	2,258,863,203.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4,522,526,400.00	2,855,874,398.00	63.14	5,754,161,401.00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2,099,000,000.00	1,699,000,000.00	80.94	2,958,750,000.00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	340,000,000.00	100,000,000.00	29.41	200,000,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta	3,256,500,000.00	2,534,415,000.00	77.82	1,661,523,800.00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	64,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	21,669,769,326.00	20,134,833,425.50	92.91	16,129,752,903.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	926,350,000.00	1,250,414,963.00	134.98	1,284,842,480.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19,494,419,326.00	17,638,662,754.50	90.48	13,973,435,759.00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,249,000,000.00	1,245,755,708.00	99.74	871,474,664.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	72,360,876,767.00	61,380,969,374.00	84.82	76,695,552,263.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	72,360,876,767.00	61,380,969,374.00	84.82	76,695,552,263.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ke	13,425,363,000.00	11,250,444,353.00	83.79	8,274,234,485.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	485,500,000.00	355,500,000.00	73.22	491,500,000.00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/	12,939,863,000.00	10,894,944,353.00	84.19	7,782,734,485.00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0.00	0.00	0.00	12,804,075,375.00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0.00	0.00	0.00	12,804,075,375.00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	21,485,858,000.00	12,607,367,924.00	58.67	188,000,000.00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	19,363,504,000.00	12,427,084,924.00	64.17	188,000,000.00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	2,122,354,000.00	180,283,000.00	8.49	0.00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0.00	14,863,100,122.00	0.00	13,979,288,656.00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0.00	14,863,100,122.00	0.00	13,979,288,656.00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19,027,975,000.00	18,445,649,199.00	96.93	18,486,953,795.42
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19,027,975,000.00	18,445,649,199.00	96.93	18,486,953,795.42
5.1.03	Belanja Bunga	12,513,281,215.00	10,477,627,645.00	83.73	12,513,281,215.00
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	12,513,281,215.00	10,477,627,645.00	83.73	0.00
5.1.03.01.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat ata	12,513,281,215.00	10,477,627,645.00	83.73	0.00
5.1.03.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah La	0.00	0.00	0.00	12,513,281,215.00
5.1.03.02.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Ja	0.00	0.00	0.00	12,513,281,215.00
5.1.05	Belanja Hibah	12,057,870,000.00	13,316,161,700.00	110.43	58,172,408,971.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyar	4,730,000,000.00	3,810,000,000.00	80.54	49,069,147,872.00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirla	2,830,000,000.00	1,910,000,000.00	67.49	3,404,548,872.00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela	850,000,000.00	850,000,000.00	100.00	44,464,599,000.00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	100.00	1,200,000,000.00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	5,837,825,000.00	8,110,161,700.00	138.92	7,999,146,099.00

5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas	5,837,825,000.00	8,110,161,700.00	138.92	7,999,146,099.00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,490,045,000.00	1,396,000,000.00	93.68	1,029,115,000.00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,490,045,000.00	1,396,000,000.00	93.68	1,029,115,000.00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6,905,000,000.00	5,380,000,000.00	77.91	3,595,000,000.00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	995,000,000.00	945,000,000.00	94.97	705,000,000.00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Indiv	995,000,000.00	945,000,000.00	94.97	705,000,000.00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	550,000,000.00	100,000,000.00	18.18	0.00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelo	550,000,000.00	100,000,000.00	18.18	0.00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (	5,360,000,000.00	4,335,000,000.00	80.87	2,890,000,000.00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lem	5,360,000,000.00	4,335,000,000.00	80.87	2,890,000,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	794,230,764,490.00	717,503,337,644.06	90.33	698,072,891,212.22
5.2	BELANJA MODAL	169,807,061,786.00	130,405,039,699.70	76.79	143,132,415,820.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1,900,000,000.00	1,662,500,000.00	87.50	365,000,000.00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1,900,000,000.00	1,662,500,000.00	87.50	365,000,000.00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1,900,000,000.00	1,662,500,000.00	87.50	365,000,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,290,659,386.00	27,018,418,091.00	86.34	28,245,063,296.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1,844,096,352.00	1,839,523,494.00	99.75	122,750,000.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1,844,096,352.00	1,839,523,494.00	99.75	122,750,000.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3,346,110,000.00	3,338,257,000.00	99.76	6,745,240,710.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3,346,110,000.00	3,338,257,000.00	99.76	5,757,450,000.00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0.00	0.00	0.00	4,995,600.00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0.00	0.00	0.00	982,795,110.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	9,000,000.00	0.00	0.00	155,500,000.00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	9,000,000.00	0.00	0.00	155,500,000.00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0.00	0.00	0.00	291,500,000.00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0.00	0.00	0.00	291,500,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5,409,320,933.00	4,581,710,725.00	84.70	3,315,959,780.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	138,000,000.00	92,871,192.00	67.29	428,491,200.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5,271,320,933.00	4,488,839,533.00	85.15	2,887,468,580.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4,557,742,654.00	4,459,689,110.00	97.84	383,274,077.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	4,557,742,654.00	4,459,689,110.00	97.84	373,774,077.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	11,255,489,698.00	8,798,270,646.00	78.16	14,388,726,420.00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4,508,211,587.00	3,933,121,832.00	87.24	7,706,524,428.00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	6,747,278,111.00	4,865,148,814.00	72.10	6,682,201,992.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1,769,501,750.00	1,660,561,850.00	93.84	596,971,900.00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1,267,485,000.00	1,163,809,600.00	91.82	533,495,500.00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0.00	0.00	0.00	63,476,400.00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	502,016,750.00	496,752,250.00	98.95	0.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2,736,642,999.00	985,636,000.00	36.01	2,206,070,609.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1,724,178,000.00	697,954,000.00	40.48	1,948,351,691.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1,012,464,999.00	287,682,000.00	28.41	257,718,918.00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0.00	0.00	0.00	19,405,500.00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0.00	0.00	0.00	19,405,500.00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0.00	0.00	0.00	1,664,300.00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0.00	0.00	0.00	1,664,300.00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	240,960,000.00	1,241,464,266.00	515.21	0.00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	0.00	1,214,913,266.00	0.00	0.00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	240,960,000.00	26,551,000.00	11.01	0.00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	121,795,000.00	113,305,000.00	93.02	18,000,000.00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	121,795,000.00	113,305,000.00	93.02	18,000,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63,969,252,198.00	60,194,794,487.00	94.09	36,214,113,965.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	53,428,966,902.00	50,857,856,844.00	95.18	35,154,072,941.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	52,378,966,902.00	50,124,256,844.00	95.69	35,154,072,941.00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1,050,000,000.00	733,600,000.00	69.86	0.00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	10,540,285,296.00	9,336,937,643.00	88.58	980,069,624.00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	10,540,285,296.00	9,336,937,643.00	88.58	980,069,624.00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0.00	0.00	0.00	79,971,400.00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0.00	0.00	0.00	79,971,400.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72,647,150,202.00	39,649,050,911.70	54.57	77,054,228,809.00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	64,297,237,938.00	32,708,042,438.00	50.87	70,803,517,914.00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	61,189,115,308.00	31,010,813,816.00	50.68	69,446,214,482.00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	3,108,122,630.00	1,697,228,622.00	54.60	1,357,303,432.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5,055,009,064.00	3,701,108,473.70	73.21	4,470,420,895.00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	568,688,264.00	273,764,263.00	48.13	2,463,878,368.00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penan	849,500,000.00	297,950,052.00	35.07	379,233,091.00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	450,000,000.00	448,880,000.00	99.75	629,727,270.00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3,186,820,800.00	2,680,514,158.70	84.11	997,582,166.00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	3,294,903,200.00	3,239,900,000.00	98.33	988,320,000.00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	497,913,400.00	496,000,000.00	99.61	988,320,000.00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1,331,000,000.00	1,278,900,000.00	96.08	0.00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	1,465,989,800.00	1,465,000,000.00	99.93	0.00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0.00	0.00	0.00	791,970,000.00

5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0.00	0.00	0.00	791,970,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	1,880,276,210.00	0.00	954,009,750.00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0.00	0.00	0.00	954,009,750.00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0.00	0.00	0.00	924,009,750.00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mik	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0.00	1,880,276,210.00	0.00	0.00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	0.00	1,853,744,210.00	0.00	0.00
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	0.00	26,532,000.00	0.00	0.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	169,807,061,786.00	130,405,039,699.70	76.79	143,132,415,820.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6,277,308,400.00	5,786,500,108.00	92.18	6,222,552,390.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6,277,308,400.00	5,786,500,108.00	92.18	6,222,552,390.00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6,277,308,400.00	5,786,500,108.00	92.18	6,222,552,390.00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	6,277,308,400.00	5,786,500,108.00	92.18	6,222,552,390.00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	6,277,308,400.00	5,786,500,108.00	92.18	6,222,552,390.00
5.4	BELANJA TRANSFER	207,950,424,276.00	161,960,587,237.32	77.88	193,774,925,413.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1,157,636,300.00	0.00	0.00	0.00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabup	1,157,636,300.00	0.00	0.00	0.00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1,157,636,300.00	0.00	0.00	0.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	206,792,787,976.00	161,960,587,237.32	78.32	193,774,925,413.00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	206,792,787,976.00	161,960,587,237.32	78.32	193,774,925,413.00
5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/k	135,552,830,000.00	104,644,549,808.00	77.19	137,211,973,000.00
5.4.02.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabup	71,239,957,976.00	57,316,037,429.32	80.45	56,562,952,413.00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	207,950,424,276.00	161,960,587,237.32	77.88	193,774,925,413.00
	JUMLAH BELANJA	1,178,265,558,952.00	1,015,655,464,689.08	86.19	1,041,202,784,835.22
	SURPLUS/DEFISIT	19,116,268,788.00	35,879,016,328.85	187.68	29,847,661,196.80
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(19,116,268,788.00)	(30,533,523,747.77)	159.72	(26,130,720,432.98)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3,716,940,764.00	3,716,290,580.23	99.98	(3,297,510,880.98)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3,716,940,764.00	3,716,290,580.23	99.98	(3,297,510,880.98)
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja d	3,716,940,764.00	3,716,290,580.23	99.98	(3,297,510,880.98)
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	3,716,940,764.00	3,716,290,580.23	99.98	(3,297,510,880.98)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3,716,940,764.00	3,716,290,580.23	99.98	(3,297,510,880.98)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22,833,209,552.00	34,249,814,328.00	150.00	22,833,209,552.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	22,833,209,552.00	34,249,814,328.00	150.00	22,833,209,552.00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	22,833,209,552.00	34,249,814,328.00	150.00	22,833,209,552.00
6.2.03.03.09	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Si	22,833,209,552.00	34,249,814,328.00	150.00	22,833,209,552.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22,833,209,552.00	34,249,814,328.00	150.00	22,833,209,552.00
	PEMBIAYAAN NETTO	(19,116,268,788.00)	(30,533,523,747.77)	159.72	(26,130,720,432.98)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	5,345,492,581.08	0.00	3,716,940,763.82

Kab. Halmahera Barat, 9 Maret 2026
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sonya Mail, SP. M.Si
NIP.197505192002122004



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
JAILOLO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JAMES UANG, S.Pd. MM**

Jabatan : Bupati Halmahera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jailolo, 02 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG, S.Pd., MM



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

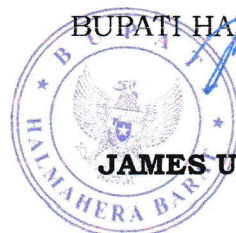
JAILOLO

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

No.	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Misi 1	Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan kesetaraan serta nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal		
1		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender	Indeks Pembangunan Manusia	68,54
2		Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	1. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 2. Harapan Lama Sekolah (tahun)	8,83 14,16
	Misi 2	Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah;		
3		Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur	72,50
	Misi 3	Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya		
4		Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata (persen) 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 3. Lama tinggal Wisatawan Mancanegara 4. Lama tinggal Wisatawan Nusantara	200 9000 2 3,5
5		Menurunnya Tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (persen)	7,77
	Misi 4	Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat		
6		Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
7		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	B

Jailolo, 02 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG, S.Pd., MM

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
URUSAN KESEHATAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rp. 80.224.464.156

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
URUSAN PENDIDIKAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	RP. 75.507.360.875

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
1	ROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	RP. 63.680.911.545.

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp. 12.250.000.000

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL		
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	RP. 2,864,884, 600

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	BELANJA DAERAH	Rp. 1.178.265.558.952.
2	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH/PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	Rp. Rp 3.817.368,40
3	PENATAAN ORGANISASI	RP. 9.000.000

Jailolo, 02 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG, S.Pd., MM



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Pengabdian No. 1 Desa Soakonora Kec. Jailolo

Telp: (0922) 2221074 Fax : (0922) 2221074

Email : inspektorathalbar@yahoo.com

Provinsi Maluku Utara

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jailolo, 13 April 2026

Inspektur,



Fenny Kiat, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19780208 199612 2 001



GOVERNOR NORTH MALUKU

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Sebagai

Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik I Tahun 2024

Sofifi, 13 Agustus 2024

Pj. GOVERNOR NORTH MALUKU

Drs. H. SAMSUDDIN ABDUL KADIR, M.Si



MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN
KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA

NOMOR: MHA-01/HA.02.01.01 Tahun 2024

Diberikan kepada :

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Yang telah :

Mendapatkan Predikat Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023

Jakarta, 10 Desember 2024

Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



Natalius Pigi





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR : 1029/Men/TK.05/7/2023

Dengan ini memberikan penghargaan kepada:

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

**Sebagai kabupaten Layak Anak Tahun 2023
Kategori Pratama**

Semarang, 22 Juli 2023

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si.



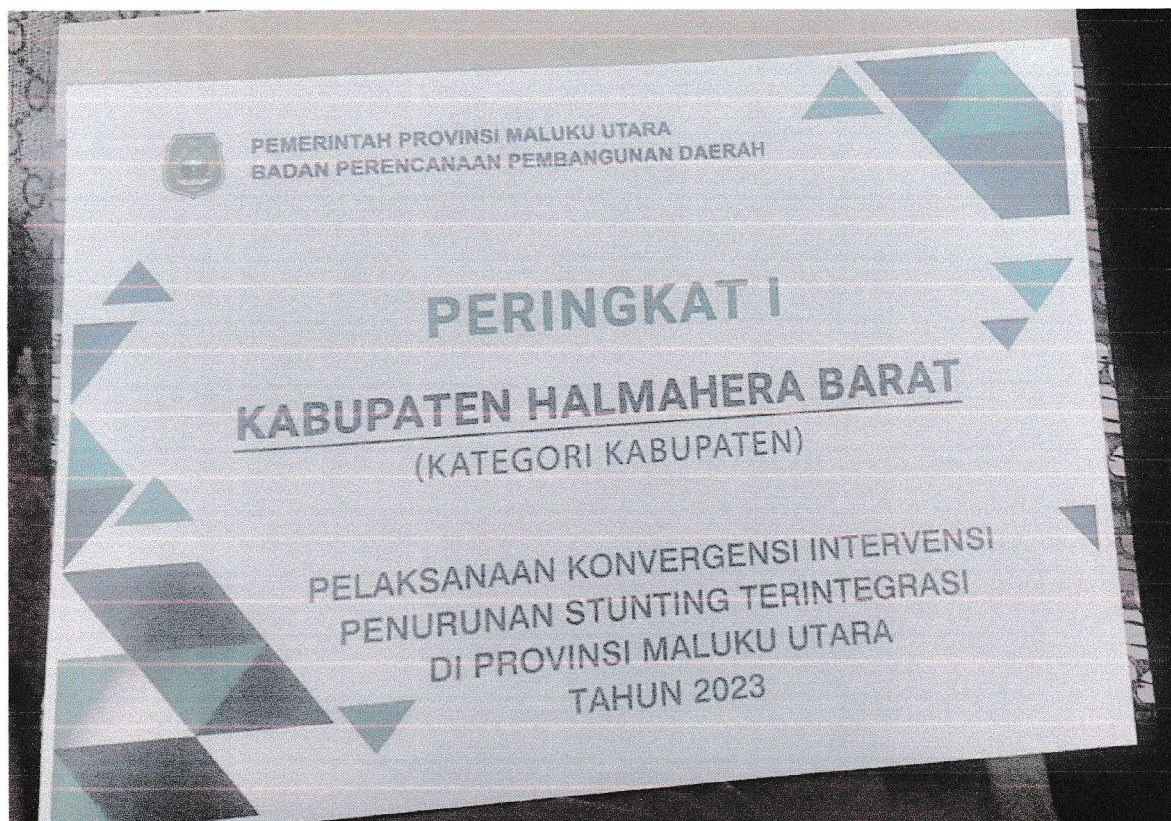
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TERBAIK II

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

(KATEGORI KABUPATEN)

PENGHARGAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024





DINAS KESEHATAN
PROVINSI
MALUKU UTARA



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS
GEMERUS
MELAKUKAN
KEMERUS

SERTIFIKAT

Penghargaan

NOMOR: 840/15-02/P2/2023

Diberikan kepada

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN
HALMAHERA BARAT**

Atas keberhasilan mencapai target Non-Polio AFP (NPAPF) rate ≥ 2 per
100.000 penduduk <15 tahun dan Discarded (bukan campak-bukan rubela)
rate ≥ 2 per 100.000 penduduk pada tahun 2022

Direktur Pengelolaan Imunisasi
Kementerian Kesehatan RI

dr. Prima Josephine, MKM

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Maluku Utara

dr. Idhar Sidi Umar, M. Kes



DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA
(DPP LPM - RI)

Memberikan Penghargaan Kepada :

BUPATI HALMAHERA BARAT

Atas Dukungan dan Kerjasamanya Membangun Kemitraan LPM di Desa/Kelurahan

Ketua Umum



DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., MT



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, HIMPUNAN DAN TEKNOLOGI
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)
PROVINSI MALUKU UTARA

CERTIFICATE OF APPRECIATION

No. 1464/C7.32/KP.11.02/2022
Diberikan kepada:

James Wang, S.Pd., M.M

BUPATI HALMAHERA BARAT

Atas dukungan dan peran serta dalam pelaksanaan
Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka
di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022



11 Februari 2022

[Signature]
S.Pd., M.Si

05182001121001